

**TINJAUAN YURIDIS DAN ETIS TERKAIT MEDIA CETAK YANG
MEMPUBLIKASIKAN PREDIKSI KEMENANGAN DARI
SITUS JUDI BOLA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

RISKI VIHANDA

NIM. 125010100111165



**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis dan Etis Terkait Media Cetak Yang
Mempublikasikan Prediksi Kemenangan dari Situs Judi Bola**

Identitas Penulis :

- a. Nama : Riski Vihanda**
- b. NIM : 125010100111165**

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka waktu penelitian : 3 Bulan

Disetujui pada tanggal : 23 Juni 2016

Pembimbing Utama



Dr. Prija Djatmika,SH.,MS
NIP. 196111161986011001

Pembimbing Pendamping



Faizin Sulistio,SH.,LLM
NIP. 197809142005011003



Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Yuliati,SH.,LLM
NIP. 19660710199203200

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS DAN ETIS TERKAIT MEDIA CETAK YANG
MEMPUBLIKASIKAN PREDIKSI KEMENANGAN
DARI SITUS JUDI BOLA**

Oleh :

RISKI VIHANDA

125010100111165

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : **10 SEP 2018**

Ketua Majelis Penguji

(Eny Harjati , SH., M.Hum)

Anggota

(Paham Triyoso , SH., MH)

Anggota

(Setiawan Noerdajasakti, SH., MH)

Anggota

(Dr. Prija Djatmika, SH., MS)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.

NIP. 196208051988021001



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id <http://hukum.ub.ac.id>

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 661/Plagiasi/FH/2016

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : RISKI VIHANDA
NIM : 125010100111165
Judul : TINJAUAN YURIDIS DAN ETIS TERKAIT MEDIA CETAK YANG
MEMPUBLIKASIKAN PREDIKSI KEMENANGAN DARI SITUS JUDI
BOLA

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ISSUED
PLAGIASI FH UB

Malang, 1 Juli 2016

Ketua Deteksi Plagiasi,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

RIWAYAT HIDUP PENULIS

- Nama : Riski Vihanda
- NIM : 125010100111165
- Fakultas/jurusan : Hukum/Ilmu hukum
- Program kekhususan : Hukum pidana
- Jenis kelamin : Perempuan
- Tempat, tanggal lahir : Blitar, 19 Mei 1995
- Alamat : Dsn. Pathuk, RT.01
RW.02, Ds. Pojok,
Kec.Garum Kabupaten Blitar
- Email : riski.vihanda@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

2006-2009	2009-2012	2012-2016
SMPN 5 Kota Blitar	SMAK Diponegoro Kota Blitar	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang Program kekhususan : Hukum Pidana GPA : 3.41

PENGALAMAN ORGANISASI

2012-2013	2012-2013	2014-2016
Staff Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Divisi Kebijakan Publik	Staff Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Divisi Sosial Masyarakat	Pengurus Lembaga Semi Otonom (LSO) Paduan Suara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

PENGALAMAN MAGANG

Juni - Juli 2015	Juli - September 2015
Lembaga Permasayarakatan klas IIA Narkotika, Sleman, DIY	Reskrim Polres Kota Malang, Unit Identifikasi



RINGKASAN

Riski Vihanda, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Juni 2016, TINJAUAN YURIDIS DAN ETIS TERKAIT MEDIA CETAK YANG MEMPUBLIKASIKAN PREDIKSI KEMENANGAN DARI SITUS JUDI BOLA, Dr.Prija Djatmika SH.,MS. dan Faizin Sulistio,SH.,L.LM.

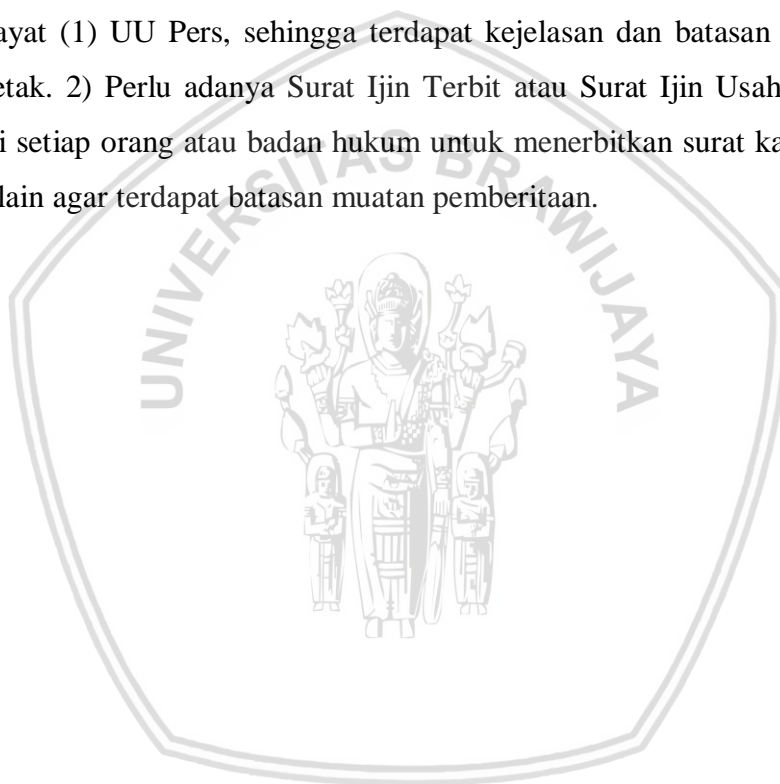
Jurnalistik Media Cetak menghasilkan berita dalam bentuk tertulis sebagai sarana penyampaian informasi kepada khalayak. Salah satu media cetak “Jawa Pos” menyajikan informasi yang menarik dan berbeda dengan media cetak lainnya, dengan menghadirkan informasi bursa sepak bola atau prediksi kemenangan sepak bola dari situs judi bola dunia, fenomena ini kemudian dikaji lebih mendalam melalui analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengingat muatan redaksional tersebut berpotensi disalahgunakan sebagai acuan dalam perjudian.

Berdasarkan hal tersebut, melalui penelitian skripsi ini penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu : 1) Apakah tindakan media cetak yang mempublikasikan prediksi kemenangan dari situs judi bola merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik?; 2) Apakah tindakan mempublikasikan prediksi kemenangan dari situs judi bola tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?.

Atas rumusan masalah tersebut di atas kemudian akan dikaji melalui pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) melalui studi kepustakaan dan dokumen. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder akan dikaji secara deskriptif kualitatif dan dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis. Sedangkan bahan hukum lain sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder yaitu data tersier berupa kuisioner.

Melalui analisis Yuridis Normatif dapat diperoleh bahwa tindakan publikasi prediksi kemenangan dari situs judi bola oleh media cetak adalah melanggar ketentuan pasal 3 dan pasal 18 ayat (2) *jo* pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Pers, serta menyimpangi Kode Etik Jurnalistik PWI pasal 1, serta dapat dikenakan pidana dalam ketentuan pasal 303 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mengkaji konsepsi rumusan, unsur-unsur tindak pidana beserta uraian unsur kesengajaannya. Namun, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pers tidak melarang secara tegas tindakan publikasi tersebut melainkan berisikan kewajiban yang berorientasi pada tindakan pasif. Oleh karena itu, perlu adanya beberapa hal berikut : 1) Menambahkan ketentuan tambahan melalui pasal tersendiri atau dalam lembar penjelasan terkait hal-hal apa saja yang dapat dimasukkan dalam pengertian “peristiwa dan opini” yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) UU Pers, sehingga terdapat kejelasan dan batasan bagi muatan media cetak. 2) Perlu adanya Surat Ijin Terbit atau Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers bagi setiap orang atau badan hukum untuk menerbitkan surat kabar, majalah dan lain lain agar terdapat batasan muatan pemberitaan.



SUMMARY

Riski Vihanda, Criminal Law, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, June 2016, Juridical and Ethical Review concerning Printed News that Announces Prediction of Football Gambling, Dr. Prija Djatmika SH., MS., and Faizin Sulistio, SH., L.LM.

Printed news provides written news as to disseminate information to public. Jawa Pos provides information in the way that is different from other newspapers, in which information on prediction of football gambling cited from the world's football gambling site is given. This phenomenon was more profoundly studied through the analysis of Act Number 40 of 1999 on Press, Code of Conduct in Journalistic Issues, and Criminal Code, recalling that such an editorial content has a tendency to lead to abuse regarding gambling reference.

Based on the issue mentioned above, this research is focused on the following research problems: 1) Does publishing the information on prediction of football gambling cited from a football site infringe Act Number 40 of 1999 on Press and Code of Conduct in Journalistic Issues?; 2) Does publishing the prediction regarding the winning in football gambling also infringe the Provision in Criminal Code?

Those research problems were further analysed with normative juridical method and statute approach through literature review and documents. The legal materials obtained consisted of primary and secondary data further analysed in descriptive and qualitative methods, followed by systematic and grammatical interpretation. Tertiary data in form of questionnaire was also used in this research.

The normative and juridical method brought to a conclusion that the provision of information on football gambling is regarded as to infringe the provision of Article 3 and Article 18 Paragraph (2) jo Article 5 Paragraph 91) of Act on Press, and it is also against the Code of Conduct in Journalistic Issues of PWI Article 1. Criminal sanction can be imposed in accordance with the provision of Article 303 Paragraph (1) Number 2 of Criminal Code, in which

formulation concept, criminal elements, and element of intent are considered and studied. However, the provisions in Act on Press do not clearly band the publication of such information regarding the gambling, as the information is regarded as passive state. Therefore, the following points need to be considered: 1) it is recommended that another provision be added regarding further explanation of 'event and opinion' as mentioned in Article 5 Paragraph (1) of Act on Press. This addition is expected to give clearer boundary printed news should refer to. 2) License for publication or License for Press need to be taken into account for every individual and legal entity to publish news, magazines, and so forth to give clearer regulation to the news content.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan penyertaan dan karunia sehingga penulis dapat sampai pada penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at,SH.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya beserta jajarannya,
2. Ibu Dr. Yuliati,SH.,L.LM selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
3. Bapak Dr. Prija Djatmika,SH.,MS selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan ilmu yang sangat berharga,
4. Bapak Faizin Sulistio,SH.,L.LM selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas kesabaran, waktu dalam membimbing serta memberikan pengarahan,
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah membagi ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama masa studi di Fakultas Hukum,
6. Dosen-dosen program kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu dan nasehat yang luar biasa berharga, khususnya dalam penyusunan skripsi ini,
7. Seluruh civitas akademika dan seluruh jajarannya atas bantuannya selama masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
8. Orang Tua tercinta Bapak Handoko dan Ibu Sri Rejeki dan keluarga besar atas doa serta motivasi dan dukungan secara lahir , batin dan materi,
9. Teman-teman HIMAKOPI yang memberikan pengarahan dan motivasi dukungan
10. Seluruh pengurus dan anggota serta singer PSM *Justicia Choir* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas dukungan baik materiil maupun doa,

11. Teman-teman Fakultas Hukum seangkatan sepejuangan yang memberikan nasehat dan dukungan,
12. Sahabat-sahabat yang terus memotivasi dan meluangkan waktu dan tenaga untuk menemani langkah penulis hingga pada penyelesaian skripsi ini, Rina, Hana, Elien, Ghofar, Fifink, Sulung, Almizan, Feliks, Okta, dll.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penulisan dalam skripsi ini, dan tak lupa juga mohon maaf atas kesalahan sikap penulis selama studi di Fakultas Hukum.

Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan berkenan selalu mencurahkan berkat-Nya.

Malang, 29 Juni 2016



Riski Vihanda

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
RINGKASAN	x
<i>SUMMARY</i>	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Sistematika penulisan	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian umum sistem pers di Indonesia	12
1. Pengertian pers	12
2. Fungsi pers	13
3. Kose Etik Jurnalustik	14
4. Tugas dan tanggungjawab pers	15
B. Kajian umum tentang media cetak	15
1. Kajian umum tentang berita	16
C. Kajian umum delik pers	18
D. Kajian umum tentang tindak pidana perjudian	23
1. Unsur-unsur tindak pidana	23

2. Rumusan kesengajaan	25
E. Kajian umum tentang tindak pidana perjudian	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian	
1. Jenis penelitian	30
2. Pendekatan penelitian	30
1) Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>)	30
B. Jenis dan sumber bahan hukum	
1. Bahan hukum primer	31
2. Bahan hukum sekunder	31
3. Bahan hukum tersier	32
C. Teknik penelusuran bahan hukum	32
D. Teknik analisis bahan hukum	33
E. Definisi konseptual	34

BAB IV PEMBAHASAN

A. Tindakan media cetak yang mempublikasikan prediksi kemenangan dari situs judi bola berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik	35
1. Analisis secara Yuridis Normatif tindakan publikasi prediksi kemenangan dari situs judi bola berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers	42
2. Analisis secara etis tindakan publikasi prediksi kemenangan dari situs judi bola berdasarkan Kode Etik Jurnalistik	50
B. Publikasi prediksi kemenangan dari situs judi bola oleh media cetak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	53
1. Unsur-unsur tindak pidana	56
1.1 Rumusan kesengajaan	59
2. Tindakan publikasi prediksi kemenangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	64

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 80

B. SARAN 82

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN 89



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 1.1 Contoh Publikasi Prediksi Kemenangan dari situs judi bola oleh media cetak	3



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 2.1 Perbandingan motivasi/tujuan pembaca redaksional olahraga sepak bola kolom prediksi kemenangan	58
2. Tabel 2.2 Nama media cetak yang beredar di wilayah Kota Malang dan perbandingan muatan redaksional	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan landasan historis keberadaan pers merupakan hasil penafsiran Pasal 28 dan 33 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945) oleh karena itu pers adalah Pers Demokratis. Dahulu, pengertian pers adalah sebagai lembaga kemasyarakatan alat revolusi, namun melalui undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 “Alat Revolusi” diubah menjadi Alat Perjuangan Nasional, ketika itulah pers menegaskan keberadaanya sebagai pers nasional sebagai cerminan dari kehidupan dan kegiatan bangsa yang merupakan bagian dari perjuangan bangsa secara keseluruhan.¹ Regulasi tentang pers terus mengalami perubahan hingga munculnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 21 Tahun 1982. Dalam pengertiannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 Pasal 1.²

Dalam perkembangannya pers semakin merambah ke dalam bidang politik dan hukum melalui media siaran berbasis investigasi dan sebagainya. Keberadaan pers semakin diperhitungkan sebagai bagian dari sosialisasi ke masyarakat atas berbagai hal yang belum diketahui oleh khalayak. Pers membawa andil besar

¹ Tribuana Said, **Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila**, CV Haji Masagung, Jakarta, 1988, Hlm. 2,3

² “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara serta gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia”.

dalam menyebarluasan informasi dan periklanan, karena produk pers yang beraneka ragam bentuknya.

Pers Nasional adalah pers yang bebas dan bertanggungjawab, rumusan yang sama yang terdapat dalam Komite Kebebasan Pers Amerika (1947).³ Kebebasan pers terdiri dari hak dalam mengelola berita dan mempublikasikannya tanpa harus mendapat izin terlebih dahulu namun tetap pada prinsip bahwa hasil berita yang diterbitkan harus bertanggungjawab. Dalam kebebasan pers munculah kewajiban-kewajiban dan tanggungjawab pers,⁴ format tanggungjawab pers ini di Indonesia sangat luas, tidak hanya wajib bertanggungjawab kepada masyarakat dan kekuasaan politik, namun juga harus bertanggungjawab kepada norma dan hukum yang berlaku di Indonesia.⁵

Pers termasuk di dalamnya kegiatan prosedural yaitu jurnalistik media massa cetak yang menghasilkan berita dalam bentuk tertulis sebagai proses penyampaian pesan atau informasi tertulis kepada khalayak. Dengan demikian secara filosofis, jurnalistik pers atau pemberitaan media massa berkewajiban menciptakan sebuah masyarakat yang bebas, damai dan produktif serta menjamin kepuasan pribadi.⁶ Kebebasan pers yang termuat dalam undang-undang cakupannya sangat luas, karena prinsip kebebasan itulah dalam salah satu media cetak yaitu Jawa Post menyajikan informasi bursa sepak bola dan situs judi bola lebih tepatnya adalah prediksi dari situs judi bola dunia. Berita tersebut dimuat setiap hari menjelang pertandingan dimulai secara rutin dan faktual. Pemberitaan info tersebut hanya dilakukan oleh salah satu media ini, karena berdasarkan hasil

³ A.Muis, **Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa (menjangkau Era Cybercommunication Milenium Ketiga)**, PT Dharu Anuttama, Jakarta, 1999, Hlm.68

⁴ Djen Amar, **Hukum Komunikasi Jurnalistik**, Alumni, Bandung, 1984, Hlm.76

⁵ A.Muis, Op Cit., Hlm.85

⁶ Ibid., Hlm.28

pengamatan, media cetak lain tidak memberitakan info terkait situs judi bola maupun prediksi, media cetak lain hanya memberikan info jadwal pertandingan dan kemenangan-kemenangan dari masing-masing tim sepak bola tersebut sebelumnya atau biasa disebut dalam kolom *head to head*. Berikut merupakan contoh publikasi prediksi kemenangan dari situs judi bola dunia.

Gambar 1.1

Contoh publikasi prediksi dari situs judi bola dunia oleh Media Cetak



Undang undang pers saat ini yaitu undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, tidak mengatur tentang batasan prosedural bagi kegiatan pemberitaan, pengiklanan, dan hak-hak yang dimiliki pers dalam hukum di Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut berisi prinsip dasar dan larangan bagi perusahaan iklan yang menerbitkan iklannya melalui media cetak, hak dan kewajiban pers, serta sanksi pidana jika melakukan pelanggaran penerbitan iklan yang tidak layak muat. Namun tidak ada ketentuan yang secara khusus melarang media cetak itu sendiri

dalam mengontrol muatan atau substansi berita yang diterbitkan. Sebagai idealnya Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum di Indonesia, undang-undang Pers muatan ketentuannya terbatas, tidak ada aturan yang secara eksplisit membatasi muatan berita oleh Media Cetak. Undang-undang Pers merupakan regulasi administratif yang memuat sanksi pidana, sehingga mengacu juga pada prinsip dasar Hukum Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sejauh ini tidak ada ketentuan khusus yang melarang Media Cetak mempublikasikan muatan tersebut, namun hukum pidana harus terus berkembang. Dengan keterbatasan undang-undang pers dapat diperluas pemaknaan untuk melihat tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran ketentuan pers. Dalam sistem pers tidak hanya perlu mematuhi undang-undang tetapi juga Kode Etik yang merupakan pedoman operasional dalam beretika secara profesional. Sehingga suatu tindakan yang melanggar ketentuan umum undang-undang secara tidak langsung telah menyimpangi Kode Etik Jurnalistik.

. Hukum pidana dalam arti objektif disebut juga *ius punale*. Menurut Mezger dalam Soedarto, hukum pidana diartikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁷ Sementara menurut Satochid Kartanegara, Hukum Pidana dalam arti subyektif diartikan sebagai sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan tentang dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukum.⁸

⁷ Fuad Usfa, **Pengantar Hukum Pidana (Edisi Revisi)**, UMM Press, Malang, 2006, Hlm : 1

⁸ Ibid., Hlm : 2

Jika dikaitkan dengan prinsip kebebasan yang bertanggungjawab, tidaklah benar jika pers media cetak menyajikan informasi yang terbuka yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kesopanan. Sedangkan dalam Kode Etik Jurnalistik, pemberitaan harus mementingkan norma susila dan norma etika karena sasaran pers adalah masyarakat yang tidak terbatas pada usia. Bila dikaitkan dengan fungsi pers salah satunya sebagai media pendidikan, tentu bursa bola dan situs judi bukan merupakan informasi yang berbasis edukasi.

Saat ini subyek hukum pidana tidak hanya individual atau *Naturalijk Person* tetapi juga *Recht person* atau Badan Hukum, Badan Hukum dianggap juga mempunyai tubuh dan jiwa / pikiran. Perusahaan pers adalah salah satu bentuk Badan Hukum yang bergerak dalam bidang pers jurnalistik yang berorientasi pada profit atau kegiatan komersial atau bertujuan untuk keuntungan ekonomi. Disamping peran Pers dalam meraih keuntungan Pers juga mengemban tanggungjawab yang besar pada masyarakat atau khalayak yaitu konsumen produk dari Perusahaan Pers. Sehingga antara pencapaian profit harus seimbang dengan hak kebebasan dan kemerdekaan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Berdasarkan Sistem Pers Demokratis dalam Pasal 28F UUDNRI 1945,⁹ terhadap ketentuan pasal 28F UUDNRI 1945 tidak boleh hanya dimaknai secara terbatas dan subjektif hanya untuk kebebasan pers itu sendiri karena terdapat frasa “berhak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”, tentu ketentuan ini berarti untuk menghormati dan menjamin hak para pembaca untuk mendapat informasi yang edukatif.

⁹ “Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945)

Menurut Wikram Iryans, kemerdekaan pers perlu dibatasi melihat dari realitas yuridis dan sosiologis saat ini undang-undang seperti cek kosong yang dapat dengan mudah diisi oleh kepentingan-kepentingan, sehingga perlu dilakukan beberapa hal berikut :¹⁰

1. Tidak ada ketentuan Surat Ijin Terbit atau Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers bagi setiap orang atau badan hukum untuk menerbitkan surat kabar, majalah dan lain-lain sehingga tidak ada batasan muatan pemberitaan.
2. Tanggungjawab pers dalam melaksanakan fungsinya hanya kepada hukum pers dan etika pers. Oleh karena Undang-undang Pers belum mengakomodir secara lengkap, Undang-undang pers harus direvisi agar mewajibkan hakim memakai hukum pers atau *lex specialist* di dalam mengadili kasus-kasus pers.
3. Agar kemerdekaan pers tidak melanggar hak-hak atau kemerdekaan pihak lain atau warga masyarakat, Dewan Pers harus diperkuat menjadi lembaga negara yang berwibawa dan independen.

Wikram berpendapat demikian karena melihat realitas kasus-kasus pers yang tidak dapat terselesaikan karena kosong hukum pers yang menjadi acuan redaksional pers. Terkait media yang memuat berita berisikan unsur perjudian, penulis mencoba mengumpulkan beberapa perbandingan hasil penelitian atas isu yang serupa yaitu terkait media. Penelitian tersebut berjudul *Kajian Yuridis Terhadap Game Online Poker Dalam Facebook sebagai Sarana Perjudian*

¹⁰ Wikram Iryans Abidin, **Politik Hukum Pers Indonesia**, Grasindo, Jakarta, 2005, Hlm.

(Tinjauan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)), penulis tersebut yaitu M.Hasta Angga mengkaji iklan ajakan yang dimuat dalam facebook dikaitkan dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan KUHP¹¹. Pasal yang digunakan dalam KUHP yaitu pasal 303 KUHP , berbeda dengan penelitian terkait peran media cetak ini yang mengkaitkan secara khusus dengan pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP dan undang-undang pers. Persamaannya adalah objek kajian yang berperan dalam pelanggaran yaitu media, dalam penelitian Hasta media yang digunakan adalah media elektronik sedangkan dalam penelitian saya menggunakan media cetak surat kabar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana sudut pandang pers atas informasi yang seperti tersebut di atas, karena banyak menimbulkan berbagai permasalahan dan pertanyaan bukan hanya bagi praktisi hukum tetapi juga masyarakat luas khususnya user judi bola. Untuk mengurai berbagai masalah tersebut penulis mengambil judul Tinjauan Yuridis dan Etis Terkait Media Cetak yang Mempublikasikan Prediksi Kemenangan dari Situs Judi Bola.

¹¹ M. Hasta Angga, **Kajian Yuridis Terhadap Game Online Poker Dalam Facebook Ssebagai Sarana Perjudian (Tinjauan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)**, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan Media Cetak yang mempublikasikan Prediksi Kemenangan dari Situs Judi Bola merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik?
2. Apakah tindakan mempublikasikan Prediksi Kemenangan dari Situs Judi Bola tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?

C. Tujuan Penelitian

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Tindakan Media Cetak yang mempublikasikan Prediksi Kemenangan dari Situs Judi Bola merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
2. Untuk mengetahui , mendeskripsikan dan menganalisis Tindakan Media Cetak yang mempublikasikan Prediksi Kemenangan dari Situs Judi Bola merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah hasil penelitian tentu harus membawa manfaat dan kegunaan, berikut beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya pidana pers dan tanggungjawab pers dalam hukum dan dapat berguna bagi pengembangan ilmu mahasiswa secara keseluruhan dan secara khusus bagi mahasiswa hukum Universitas Brawijaya dan calon peneliti lain .

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan Media Cetak

Penelitian ini diharapkan mampu membawa saran positif dan membangun bagi perusahaan pers untuk lebih memperhatikan koridor hukum dan kontrol sosial, sehingga kedepannya dapat menjadi lembaga yang profesional dan bertanggungjawab.

b. Bagi user judi bola

Penelitian ini diharapkan mampu membawa saran bagi user yang sekaligus konsumen media cetak untuk dapat bijaksana dalam menelaan informasi yang disajikan media cetak surat kabar sehingga tidak menggunakan informasi tersebut sebagai keuntungan atau kemudahan untuk melakukan suatu tindak pidana perjudian.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan tambahan wawasan bagi masyarakat tentang fenomena hukum yang sering tidak disadari masyarakat, sehingga masyarakat sebagai juri sosial mampu melakukan *check and balance*.

E. Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan

Di bab ini berisikan latar belakang yaitu uraian isu hukum yang penulis ambil, rumusan masalah sebagai pembatasan penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang hendak dicapai yaitu terdiri dari manfaat Teoritis dan praktis.

2. BAB II Kajian Pustaka

Dalam bab ini menguraikan beberapa teori-teori yang relevan berkaitan dengan permasalahan dalam judul dan isu hukum penelitian skripsi ini. Teori-teori ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan pencarian melalui internet.

3. BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan, jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier (sebagai data pendukung), teknik penelusuran bahan hukum, teknis analisis bahan hukum, serta definisi konseptual.

4. BAB IV Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian normatif dan input data kuisisioner sebagai bahan hukum tersier/data pendukung yang telah penulis kumpulkan dan analisa menggunakan teori-teori yang ada dalam Kajian Pustaka.

5. BAB V Penutup

Di dalam bab ini berisi kesimpulan hasil pembahasan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dikaji.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Sistem Pers di Indonesia

1. Pengertian Pers

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara serta gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.¹

Pengklasifikasian produk pers didasarkan pada bentuk produk, dalam pengertian tersebut di atas, surat kabar (koran), majalah, tabloit dapat disebut sebagai media cetak atau pers cetak. Dalam hal ini media cetak memegang moto kebebasan pers atau kemerdekaan pers yang diwujudkan dalam bentuk :²

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara Indonesia.
2. Terhadap pers nasional tidak dapat dikenai penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887)

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887)

Yang dimaksud dengan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara Indonesia adalah bahwa pers bebas dari tindakan penyensoran, pelarangan, dan atau penekanan terkait penerbitan redaksional maupun penyiaran agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terpenuhi. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers. Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

2. Fungsi pers

Fungsi Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang

Pers :

- (1) Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial ;
- (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.³

Dalam pengaturannya disamping fungsi yang terdapat pada point 1, pers berfungsi sebagai lembaga ekonomi, dalam penerapannya orientasi pada ekonomi atau keuntungan ekonomi lebih diutamakan daripada fungsinya yaitu kontrol sosial karena muatan penyajian.

³ Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887)

Disamping fungsi-fungsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Hikmat K dan Purnama K menrangkum beberapa fungsi pers, yaitu :⁴

- a) Fungsi informatif
- b) Fungsi kontrol pers yang bertanggungjawab yang biasa disebut *watchdog*
- c) Fungsi Interretatif dan Direktif
- d) Fungsi menghibur
- e) Fungsi regeneratif
- f) Fungsi pengawasan hak-hak warga negara
- g) Fungsi ekonomi
- h) Fungsi swadaya

3. Kode Etik Jurnalistik

Etika Profesi Jurnalistik di Indonesia telah dibuat tertulis, kode etik jurnalistik ini pada dasarnya memuat kaidah-kaidah non hukum. Secara umum prinsip Etika Profesi Jurnalistik harus berpihak pada kepentingan umum. Meskipun tidak mengandung sanksi seperti undang-undang namun ketentuan-ketentuannya harus dipatuhi karena jika tidak martabat dan profesi wartawan akan memburuk.

Kode Etik Pers ada beberapa produk, karena berasal atau dibuat oleh Organisasi Pers, sedangkan di Indonesia ada banyak Organisasi Pers. Namun dalam sistem pers terdapat 1 Kode Etik yang telah berlaku umum

⁴ Hikmat Kusumaningrat, Purnama Kusumaningrat, Op Cit, Hlm.27-29

karena telah disetujui oleh 29 Organisasi Pers yaitu Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) . Apabila dikaitkan dengan media cetak yang menyajikan info terkait bursa bola yang berdampak pada keuntungan bagi user judi bola, lebih dapat dikaji berdasarkan Kode Etik PWI karena berorientasi pada penulisan dan redaksional.

Fungsi kode etik jurnalistik sebenarnya dapat mengamankan pelaksanaan kebebasan dan tanggungjawab sosial pers dari incaran ranjau-ranjau hukum pers. Etika komunikasi pers yaitu penjaga gawang (*gatekeeper*), yaitu cara melakukan seleksi terhadap kejadian-kejadian yang layak berita atau memiliki nilai berita.⁵ Dengan demikian secara garis besar media massa harus turut serta membangun masyarakat dengan menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi pembangunan sosial.

4. Tugas dan Tanggungjawab Pers

Ketergantungan masyarakat yang semakin besar kepada media massa mempunyai makna bahwa media harus memikul tanggungjawab moral dan etika terhadap kemaslahatan masyarakat. Hal ini memberikan hak bagi masyarakat sebagai konsumen media masa untuk mendapatkan berita yang edukatif, lengkap dan benar.

B. Kajian Umum tentang Media Cetak

Menurut Gamble, media masaa adalah bagian komunikasi antar manusia dalam arti, media merupakan saluran atau sarana untuk

⁵ A.Muis, Op Cit, Hlm.86

memperluas dan memperjauh jangkauan proses penyampaian pesan antar manusia.⁶ Media cetak adalah suatu dokumen atau segala hal yang dikatakan orang lain atau suatu peristiwa yang dihimpun jurnalis dan disajikan dalam bentuk tulisan, gambar, foto, grafis, dll yang dicetak secara estetik. Media cetak digolongkan menjadi 2 jenis yaitu media cetak sebagai pers dalam arti luas, dan dalam arti sempit. Penggolongan ini juga didasarkan pada waktu penerbitan. Dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian pada Media Cetak Surat Kabar/koran.

1. Kajian Umum tentang Berita

Pemberitaan dalam bentuk surat kabar harus memuat beberapa unsur berita yang menjadikan sebuah berita tersebut memenuhi nilai-nilai berita. Unsur-unsur tersebut adalah :

- 1) Aktualitas (*timeliness*), unsur ini ada karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap berita yang tepat waktu, sehingga masyarakat dapat segera membaca informasi atas kejadian atau peristiwa yang terjadi saat itu juga. Kesimpulannya, semakin baru peristiwanya, semakin aktual atau semakin cepat peristiwa tersebut dimuat semakin tinggi nilai berita tersebut;
- 2) Kedekatan (*proximity*), peristiwa yang mengandung kedekatan dengan pembaca akan menarik perhatian. Kedekatan yang dimaksud disini bukan hanya kedekatan secara fisik tetapi juga kedekatan secara emosional.

⁶ Ibid., Hlm. 56

- 3) Keterkenaan (*prominence*), pengutamaan berdasarkan status sosial antar anggota masyarakat, yang kemudian menentukan tampilan pada berita.
- 4) Dampak , ukuran sebuah dampak biasanya dapat ditentukan dari hasil pertanyaan “ berapa orang yang terkena dampaknya? Seberapa lama dampak itu dirasakan mereka?” ;
- 5) *Human Interest* , mengandung unsur yang menarik simpati, empati dan menggugah perasaan khalayak yang membaca.

Dalam penyajian berita olahraga ada satu hal yang perlu diperhatikan adalah dalam pemberitaan harus tetap mendukung atau menyorot tim tuan rumah. Namun tetap pada prinsipnya, tidak boleh memphlawankan pemain-pemain yang berlebihan. Setiap pertandingan atau perlombaan olahraga bola tentu berpedoman pada aturan-aturan yang sama. Tetapi, daya tarik utama sebuah pertandingan mungkin adalah salah satu dari sejumlah unsur potensial yang bernilai berita.⁷ Menurut MacDougal, dalam menetapkan hal menarik atau *feature* sebuah pertandingan, dapat mempertimbangkan unsur-unsur potensial berikut :⁸

- 1) Arti suatu pertandingan
- 2) Perkiraan hasil pertandingan
- 3) Bagaimana kemenangan diraih
- 4) Permainan-permainan yang penting

⁷ Hikmat Kusumaningrat, Purnama Kusumaningrat, Op Cit., Hlm. 217

⁸ Ibid, Hlm. 218

- 5) Rekor individual, bintang,dsb
- 6) Cedera
- 7) Event atau penontonnya
- 8) Cuaca
- 9) Boks hasil pertandingan (skor), klasemen, dan statistik

C. Kajian Umum tentang Delik Pers

Berikut macam-macam delik pers dan delik yang berkaitan dengan media cetak :⁹

1. Pembocoran Rahasia Negara (Pasal 112)¹⁰
2. Pembocoran Rahasia Hankam Negara ¹¹
3. Penghinaan (Pasal 134-137, 142-144, 154-155,156-163,207-208,320-321)

Pada dasarnya penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual. Bentuk penghinaan dalam KUHP di bagi menjadi beberapa bagian :¹²

⁹ Departemen Penerangan RI ,**Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Yang Ada Kaitannya Dengan Media Massa**, Direktorat Publikasi Direktorat Jenderal PPG Departemen Penerangan RI, Jakarta, 1999, Hlm.1

¹⁰ Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :
“Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangannya yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

¹¹ Pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :
“(1) Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau bendabenda yang bersifat rahasia yang bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunanya benda- benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

- 1) Pencemaran
- 2) Pencemaran tertulis
- 3) Penghinaan ringan
- 4) Fitnah
- 5) Fitnah pengaduan
- 6) Fitnah tuduhan

Dari beberapa macam penghinaan tersebut yang dalam bentuk tertulis dapat dilakukan oleh pers, artinya hanya 3 macam penghinaan yang berkaitan dengan pers yaitu pencemaran tertulis, penghinaan ringan dan fitnah. Sehingga dari 12 pasal dalam penghinaan, yang dapat dikenakan pada pers adalah 8 pasal saja. Utamanya pasal 310, 311 dan 315 KUHP.¹³

¹² Wina Armada, **Wajah Hukum Pidana Pers**, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989 , Hlm. 52,53

¹³ Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :
“(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :
“(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan”.

Pasal 315 Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :
“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

4. Pelanggaran kesusilaan (Pasal 282,316-317)¹⁴
5. Pelanggaran hak ingkar (Pasal 322) ¹⁵
6. Pendahan penerbitan dan percetakan (Pasal 483-485)¹⁶
7. Pelanggaran ketertiban umum (Pasal 533) ¹⁷

¹⁴ Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan”.

¹⁵ Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

“(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu”.

¹⁶ Pasal 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

“Barang siapa menerbitkan sesuatu tulisan atau sesuatu gambar yang karena sifatnya dapat diancam dengan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika:

1. si pelaku tidak diketahui namanya dan juga tidak diberitahukan namanya oleh penerbit pada peringatan pertama sesudah penuntutan berjalan terhadapnya;
2. penerbit sudah mengetahui atau patut menduga bahwa pada waktu tulisan atau gambar itu diterbitkan, si pelaku itu tak dapat dituntut atau akan menetap di luar Indonesia”.

Pasal 484 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

“Barang siapa mencetak tulisan atau gambar yang merupakan perbuatan pidana, diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika:

1. orang yang menyuruh mencetak barang tidak diketahui, dan setelah ditentukan penuntutan, pada teguran pertama tidak diberitahukan olehnya;
2. pencetak mengetahui atau seharusnya renduga bahwa orang yang menyuruh mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar Indonesia”.

Pasal 485 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

“Jika sifat tulisan atau gambar merupakan kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, maka penerbit atau pencetak dalam kedua pasal di atas hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu”.

¹⁷ Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

“Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

8. Haatzaai-artkelen

Terdiri dari pasal 154 hingga 157 KUHP yang dibagi menjadi pasal 154 dan 156a merupakan delik pers sedangkan pasal 155 dan 157 merupakan delik penyiaran.¹⁸

9. Delik pornografi

Dimuat dalam pasal 281,282,532 dan 533 KUHP

Dalam hal ini pornografi untuk pers berlaku pasal 282 dan pasal 533 KUHP¹⁹

1. barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
2. barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
3. barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;
4. barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun;
5. barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun.

¹⁸ Wina Armada, Op Cit ., Hlm.59

Pasal 154 Kitab UndangUndang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 156 Kitab UndangUndang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

“ Barang siapa di rnuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiaptiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”.

Pasal 156 a

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹⁹ Wina Armada, Op Cit ., Hlm.65

Organisasi Pengarang Indonesia (OPI) tahun 1956 mengeluarkan pernyataan terkait karangan dan gambar yang masuk ke dalam kategori porno, yaitu sebuah tulisan atau gambar dapat melanggar perasaan kesopanan, jika tulisan atau gambar itu tidak sedikitpun mengandung nilai, melainkan hanya mengandung keinginan/semangat untuk dengan sengaja membangkitkan nafsu birahi belaka, sehingga menurut norma (agama, keTuhanan, keilmuan dan sebagainya) yang berlaku dalam suatu zaman dan dalam suatu masyarakat yang menimbulkan pikiran yang menyeret orang yang membaca/mendengar/melihatnya pada suatu pelanggaran susila.²⁰

10. Kabar bohong

11. *Trial by the Press*

Artinya apabila pers memberitakan atau ,mengemukakan seluruh kejadian tanpa sensor termasuk nama lengkap dan potret terdakwa, sama halnya seperti hakim dan atas pemberitaan tersebut dapat mempengaruhi jalannya sidang secara keseluruhan atau sebagian. Pengungkapan potret terdakwa sama halnya pers menghakimi pelaku dan memberi kesan seolah-olah pelaku memang bersalah, sedangkan dalam hukum dikenal asas praduga tak bersalah. Yangmana pers juga harus mengacu pada asas tersebut.²¹

²⁰ Ibid ,. Hlm.68

²¹ Ibid ,. Hlm.74

D. Kajian Umum tentang Tindak Pidana

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ada dua pandangan dalam mengkaji terkait tindak pidana yang dapat menentukan adanya penjatuhan pidana, yaitu pandangan Monoistis dan Dualistis.

- 1) Pandangan Monoistis berorientasi pada semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana.

Pandangan ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatan dengan pertanggungjawaban pidananya.²² Salah

satu ahli dalam pandangan Monoistis adalah Simon, yang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah : 1)

perbuatan manusia (positif atau negatif), 2) diancam dengan pidana, 3) melawan hukum, 4) dilakukan dengan kesalahan, 5) oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²³

Dari kelima unsur Simon tersebut yang dikenal dengan unsur subjektif dan objektif. Inti dari pandangan ini adalah

bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan.²⁴ Landasan historis

pandangan ini berasal dari ajaran Finale Handlungslehre

bahwa setiap perbuatan pidana harus didasari

intensionalitas untuk mencapai tujuan tertentu sehingga

perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan final.

²² Masruchin Rubai, **Asas-Asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang, 2001, Hlm.22

²³ Ibid

²⁴ Roeslan Saleh, **Beberapa catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam hukum Pidana**, Aksara Baru, Jakarta, 1979, Hlm. 13

Menurut pandangan ini perbuatan pidana hanya ditujukan kepada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan sebagai sebuah kesengajaan, artinya tidak memperhitungkan perbedaan niat pelaku, bagi pandangan ini semua niat pelaku adalah sama karena penekanan ada pada akibat.

2) Pandangan Dualistis

Dalam pandangan ini memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pemisahan ini menjadi dasar pandangan ini, dan yang menjadi unsur tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act*.²⁵

Dalam menentukan rumusan tindak pidana, perlu dianalisa terkait unsur subjektif dan objektif suatu tindak pidana. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri seseorang / pelaku termasuk niat dan pemikiran yang ada dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur eksternal diluar diri pelaku yang erat kaitannya dengan keadaan ketika suatu tindakan pelaku dilakukan. Unsur subjektif tindak pidana adalah :²⁶

- 1) (*dolus* atau *culpa*) atau Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- 2) Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*)
- 3) Macam-macam maksud (*oogmerk*)
- 4) Merencanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut atau *vress*

²⁵ Masruchin Rubai, Op cit, Hlm. 23

²⁶ Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, Op Cit., Hlm .192

Sedangkan unsur objektif suatu tindak pidana adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku, meliputi kausalitas perbuatan

Macam- macam klasifikasi dalam unsur subjektif dan objektif tidak diterapkan secara kumulatif, sehingga satu syarat terpenuhi sudah dapat diartikan memenuhi suatu unsur. Keterkaitan antar unsur tidak terlepas dari beberapa hal diatas tetapi juga pada klasifikasi delik, delik formil atau delik materiil. Delik formil menekankan pada perbuatan yang dilarang, sedangkan delik materiil menekankan pada akibat yang dilarang karena menimbulkan suatu akibat konstitutif. Tetapi pada konsepsi utama terlebih dahulu rumusan tindak pidana harus ditentukan unsur subjektif yaitu isi hati pelaku, berupa kesengajaan atau ketidaksengajaan.

2. Rumusan Kesengajaan

Dalam membahas unsur-unsur dari delik-delik telah dipergunakan istilah *Dolus* dan *culpa*, khususnya pada unsur-unsur *opzet* dan *schuld*. Seorang pelaku dapat dikatakan telah melakukan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan secara sengaja adalah ketika pelaku benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan atau mengetahui maksud dari perbuatannya.

Menurut Profesor Van Hamel, pada delik materiil atau *voltooid delict*, *opzet* atau kesengajaan hanyalah berkenaan dengan sesuatu

yang telah dilakukan atau tentang sesuatu yang telah ditimbulkan.²⁷

Pada delik delik yang telah disyaratkan bahwa delik delik tersebut dilakukan harus dengan sengaja, *opzet* hanya dapat ditujukan pada :

- a. Tindakan tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu;
- b. Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang undang-undnag;
- c. Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan.

Dalam *code penal* mengenai *dolus* adalah apabila dari suatu perbuatan yang terlarang, yang telah dilakukan dengan sengaja itu telah timbul suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku.²⁸

Kesengajaan dibagi menjadi 3 yaitu :²⁹

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*)

Menurut Prof. Van Hatum, *opzet als oogmerk* ditujukan kepada tindakan tindakan, baik merupakan tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ataupun tindakan untuk menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.

- 2) Kesengajaan sadar kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

²⁷ Ibid., Hlm . 294

²⁸ Ibid., Hlm . 313

²⁹ Ibid., Hlm . 312

Suatu kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kepastian timbulnya akibat lain dari akibat yang dikehendaki pelaku. Misalnya si pelaku melakukan pencurian, ia telah menyadari kepastian akan pecahnya dinding kaca itu jika ia pukul, yakni untuk dapat mengambil benda di dalam etalase.

3) Kesengajaan sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*)

Kesengajaan yang timbul ketika pelaku telah menyadari adanya akibat yang timbul selain akibat yang dikehendaki tetapi pelaku tersebut tetap melakukan perbuatannya atau tidak ada kesadaran untuk membatalkan niatnya dan kemudian ternyata akibat tersebut benar-benar terjadi.³⁰

Unsur-unsur dalam perumusan tindak pidana merupakan hal mutlak, tidak dapat dikesampingkan. Namun terkadang ketentuan yang telah diakomodir dalam KUHP kurang jelas atau kabur sehingga perlu interpretasi atau pemaknaan lebih melalui metode penemuan hukum. Metode-metode penemuan hukum pada dasarnya dipakai oleh hakim, namun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tersebut untuk merumuskan tindakan yang dapat diklasifikasikan ke dalam tindak pidana yang diatur KUHP.

³⁰ Ibid., Hlm .318

E. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Perjudian

Pengertian perjudian secara yuridis telah diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 303 ayat (3) :³¹

Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan dan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.

Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan norma Agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi masyarakat, Bangsa dan Negara. Berdasarkan pasal 1 Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian :

“Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.

Ancaman pidana yang dikenakan bagi pelaku perjudian diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yaitu :³²

(1) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-selamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya Sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

(2) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

³¹ Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040)

- (3) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- (4) Merubah sebutan pasal 541 menjadi pasal 303 Bis.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian ini penulis gunakan untuk mengkaji isu hukum terkait Media Cetak yang mempublikasikan prediksi kemenangan dari Situs Judi Bola berdasarkan ketentuan KUHP, Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Penelitian ini dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaidah hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pendekatan yang menjadi bagian dari analisis dalam tujuan menemukan hasil dari masalah yang telah dirumuskan penulis. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Statute Approach adalah pendekatan perundang-undangan. Melalui perundang-undangan yang mengatur tentang perjudian pada umumnya.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isi dan sifatnya mengikat antara lain :

- 1) Pasal 28 dan 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945) dan penjelasannya;
- 2) Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasannya;
- 3) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan penjelasannya;
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik (ITE);
- 6) Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamatan Terhadap Barang-barang Cetak dan penjelasannya;
- 7) Kode Etik Jurnasiltik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

2. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan;
- 2) Skripsi, artikel internet atau jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan;
- 3) Pendapat para ahli atau sarjana.

3. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kuisioner untuk user judi bola dan konsumen media cetak yang membaca berita bursa sebagai data pendukung untuk rumusan tindak pidana.
- 2) Kamus Hukum
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris - Indonesia

C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dan akses internet, kecuali bahan hukum tersier berupa kuisioner untuk populasi dengan batasan kualitatif sebagai berikut : Pembaca koran Jawa Pos bagian redaksional olahraga sepakbola, mengikuti taruhan, berumur 21-30 tahun.¹ Dari populasi tersebut kemudian dilakukan penelusuran dengan menggunakan *Non Probably Sampling* yaitu teknik *Snow Ball Sampling*.²

¹ Populasi teoretis adalah sejumlah populasi yang telah ditentukan batas-batasnya secara kualitatif, biasanya digunakan untuk penelitian yang memiliki populasi luas dan kualitasnya beragam.

Nurul Zuriah, **Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori dan aplikasi)**, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm.117

² Snowball Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Sering digunakan pada penelitian kualitatif.

Nova Oktavia, **Sistematika Penulisan Karya Ilmiah**, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 46

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penemuan hukum, dikenal berbagai macam metode yang harus digunakan oleh hakim sebagai instrumen untuk membentuk hukum dalam menafsirkan bunyi undang-undang, metode yang digunakan adalah Metode Interpretasi Hukum.³

Teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan cara Bahan Hukum primer dan sekunder yang telah dihimpun kemudian dikaji dengan pendekatan undang-undang melalui metode interpretasi. Di sini peneliti menggunakan Beberapa metode yang termasuk dalam metode interpretasi yaitu:

- 1) Interpretasi Gramatikal

Interpretasi ini dilakukan dengan menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.

- 2) Interpretasi Sistematis atau Logis

Metode yang menafsirkan suatu undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk bahan hukum sekunder berupa kuisioner untuk user judi bola, hasil dari teknik *purposive sampling* tersebut yang merupakan hasil penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengolah data yang telah diaudit dan dipisahkan dan dipilih yang paling *relevance* kemudian diolah dan disusun secara sistematis dan diuraikan sehingga memperoleh gambaran yang jelas terkait objek penelitian. Selanjutnya seluruhnya

³ Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.61

akan dikaji dengan teori dan prinsip hukum dalam hukum pidana dan dengan pendapat-pendapat para ahli, untuk dianalisis secara normatif.

E. Definisi Konseptual

- 1) Prediksi Kemenangan berasal dari hasil perhitungan melalui pengamatan statistik dan rekor-rekor kemenangan terdahulu yang menghasilkan prosentase kemenangan yang dapat diperoleh oleh tim tertentu;
- 2) Media cetak Surat Kabar adalah bagian dari Pers yang secara redaksional penyampaian informasi suatu hal kepada khalayak dalam bentuk cetak, dalam hal ini yang menjadi topik pembahasan adalah Surat Kabar (Koran);
- 3) Judi Bola adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan, demikian halnya jika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain. Termasuk pula dalam pengertiannya yakni semua perikatan yang sifatnya untung-untungan tentang hasil pertandingan-pertandingan bola.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tindakan Media Cetak yang mempublikasikan prediksi dari situs Judi Bola berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.¹

Penyampaian informasi oleh Pers dapat dituangkan dalam bentuk tulisan salah satunya melalui berita yang bersifat *feature* yaitu berita tentang olahraga. Olahraga yang selalu mendapatkan tempat terdepan dalam sebuah pemberitaan di media cetak surat kabar adalah olahraga sepakbola karena dalam sebuah pemberitaan tidak hanya melihat dari satu sisi yaitu berita-berita yang patut ditulis tetapi juga mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dari peminat olahraga sepakbola. Dalam proses pembuatan berita tersebut dikenal tahapan prosedural yaitu proses kerja Jurnalistik yaitu proses input berita hingga penerbitan media cetak koran yaitu sebagai berikut :²

¹ Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887)

² Ahmad Kurnia, Proses Kerja Jurnalistik (online),
<http://manajemenkomunikasi.blogspot.co.id/2010/06/proses-kerja-jurnalistik.html>, 20 Juni 2010,
diakses 30 Mei 2016

1. Rapat Redaksi, yaitu untuk menetapkan topik yang akan ditulis dalam draft berita untuk penerbitan edisi selanjutnya. Dalam hal berita olahraga, tema ditentukan oleh pertandingan dari tim yang akan berlangsung .
2. Reportase, merupakan tahap setelah rapat redaksi selesai. Tahap dimana wartawan harus turun ke lapangan untuk mencari data sebanyak mungkin yang berhubungan dengan topik yang telah ditetapkan. Dalam proses ini wartawan tidak hanya menggalu informasi melalui narasumber tetapi juga menginput data melalui media lain. Misalnya publikasi prediksi kemenangan yang diinput oleh wartawan Jawa Pos melalui situs atau bursa judi seperti *williamhill*, *landrock*, *bwin*, *bet365*, *CORAL*, *Sportingbet*.
3. Penulisan Berita merupakan tahap dimana wartawan menulis berita dengan berpedoman pada prinsip “5 W + 1 H” yang bertujuan untuk mendapatkan berita yang ideal dan lengkap. Prinsip ini terdiri dari “*what*” / apa yang terjadi, “*who*”/ siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, “*why*”/ mengapa terjadi, “*when*”/ kapan terjadinya, “*where*”/ di mana terjadinya, dan “*how*”/ bagaimana cara terjadinya. Sedangkan jenis tulisan *feature* seperti berita olahraga memiliki ciri-ciri yang berbeda yaitu sebagai berikut:³

- 1) Gaya penulisan atau pilihan kata yang digunakan merupakan gabungan antara bahasa artikel dan sastra, sehingga cenderung menarik dan mudah dipahami.
- 2) Inti berita tersebar di seluruh bagian tulisan. Tidak ada ketentuan induktif dan deduktif dalam berita olahraga. Oleh karena itu, untuk

³ Ahmad Kurnia, Op Cit

mengetahui berita olahraga tersebut, pembaca harus membaca dari kalimat pertama hingga terakhir.

- 3) Prinsip “5w + 1h” tetap digunakan, tetapi tidak terlalu diperhitungkan, karena lebih mengutamakan gaya bahasa informal.
- 4) Gaya bahasa yang digunakan lebih santai dan bergaya, sehingga dapat menarik minat pembaca.

4. *Editing*, merupakan proses penyempurnaan *draft* berita yang bertujuan untuk penyempurnaan penulisan berita dan terhindar dari kesalahan dalam tulisan dan ketepatan penggunaan kalimat. Penyuntingan ini dilakukan pada ejaan, kelengkapan data, ketepatan penggunaan kalimat, dll.
5. *Setting* dan *Layouting*, adalah tahapan pengetikan *draft* berita yang berguna untuk pemilihan jenis dan ukuran huruf. Sedangkan *layout* adalah pengaturan tata letak serta suatu berita. *Setting* dan *layout* adalah tahapan akhir dari proses pembuatan berita dalam jurnalistik. Berita yang telah melalui proses ini kemudian dicetak sesuai jumlah yang ditetapkan.

Segala bentuk informasi atau pemberitaan dalam surat kabar harus memuat beberapa unsur berita yang menjadikan sebuah berita tersebut memenuhi nilai-nilai berita. Unsur-unsur tersebut adalah :⁴

- 1) Aktualitas (*timeliness*), unsur ini ada karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap berita yang tepat waktu, sehingga masyarakat dapat segera membaca informasi atas kejadian atau peristiwa yang terjadi saat itu juga.

⁴ Hikmat Kusumaningrat, Purnama Kusumaningrat, Op Cit, hlm. 61-64

Informasi seputar sepakbola di surat kabar selalu *up to date* dan aktual, surat kabar selalu menerbitkan prediksi kemenangan dan info terkait lainnya setiap pagi menjelang pertandingan sepakbola yang biasanya berlangsung malam hari pada hari tersebut.

- 2) Kedekatan (*proximity*), peristiwa yang mengandung kedekatan dengan pembaca akan menarik perhatian. Kedekatan yang dimaksud disini bukan hanya kedekatan secara fisik tetapi juga kedekatan secara emosional.
- 3) Keterkenaan (*prominence*), pengutamaan berdasarkan status sosial antar anggota masyarakat, yang kemudian menentukan tampilan pada berita. Unsur ini tidak berlaku untuk pemberitaan sepakbola karena sifat berita *sports* berbeda dengan berita sosial ,politik dan ekonomi. Sehingga pengutamaan berdasarkan status sosial tidak dapat diterapkan.
- 4) Dampak , ukuran sebuah dampak biasanya dapat ditentukan dari hasil pertanyaan “ berapa orang yang terkena dampaknya? Seberapa lama dampak itu dirasakan mereka?”. Ukuran seberapa berdampaknya Info seputar sepakbola yaitu prediksi kemenangan bagi masyarakat dapat dilihat secara langsung dari minat baca para pecinta sepakbola yang menggunakan acuan untuk bertaruh. Untuk lebih lanjut terkait prosentase acuan peminat sepakbola untuk bertaruh akan dibahas dalam rumusan masalah kedua yaitu dalam tabel 2.1.
- 5) *Human Interest* , mengandung unsur yang menarik simpati, empati dan menggugah perasaan khalayak yang membaca. Dalam setiap pemberitaan unsur ini adalah unsur yang otomatis terpenuhi jika ketiga unsur diatas terpenuhi dan penentuannya mudah, yaitu dengan melihat minat baca

konsumen bisa mengukur *human interest* para pembaca dalam hal ini pecinta sepakbola.

Dalam pengaturannya fungsi yang terdapat pada ayat 1, pers juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi, namun dalam penerapannya orientasi pada ekonomi atau keuntungan ekonomi lebih diutamakan daripada fungsinya yaitu kontrol sosial karena muatan publikasi prediksi kemenangan tersebut. Disamping fungsi-fungsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Hikmat K dan Purnama K merangkum beberapa fungsi pers, yaitu :⁵

1. Fungsi informatif, yaitu memberikan informasi kepada khalayak secara aktual dan dengan cara yang teratur. Dalam hal ini Media Cetak yang mempublikasikan prediksi kemenangan telah menyampaikan peristiwa-peristiwa yang diperkirakan akan terjadi dan dapat langsung berguna melalui himpunan dari beberapa sumber, jadi fungsi informatif pers telah terpenuhi;
2. Fungsi kontrol pers yang bertanggungjawab artinya Pers harus memberitakan informasi yang berjalan baik dan tidak berjalan baik, yang biasa disebut *watchdog* . Dalam hal publikasi prediksi kemenangan dari situs judi bola merupakan wujud kontrol pers namun tidak bertanggungjawab, karena merusak kesusilaan atau norma masyarakat.
3. Fungsi Interetatif dan Direktif, yaitu memberikan interpretasi kepada masyarakat terkait hal baru yang mungkin tidak banyak diketahui oleh banyak orang dengan cara menceritakan arti suatu kejadian atau fenomena;

⁵ Ibid, Hlm.27-29

4. Fungsi menghibur berupa menyajikan humor dan kisah atau drama atau yang bersifat *feature*;
5. Fungsi regeneratif berupa pemberitaan terkait warisan sosial kepada khalayak terutama yang menjadi sasaran adalah generasi baru. Berita berupa publikasi prediksi kemenangan bukan merupakan warisan yang baik bagi generasi selanjutnya sehingga tidak layak untuk dipublikasikan dengan kata lain tidak memenuhi fungsi regeneratif;
6. Fungsi pengawalan hak-hak warga negara artinya tidak berpihak pada golongan tertentu sehingga tidak semakin menimbulkan tirani golongan mayoritas yang menekan golongan minoritas;
7. Fungsi ekonomi, mengembangkan perekonomian di bidang pers. Perusahaan pada dasarnya mengedepankan keuntungan termasuk perusahaan pers yang lebih mengutamakan meningkatnya pemasaran atau minat konsumen dari pada mengontrol muatan redaksionalnya;
8. Fungsi swadaya artinya pers mempunyai kewajiban memelihara keuangan sebagai inventaris dan modal perusahaannya sendiri dan tidak tergantung pada pihak luar.

Pada umumnya ideal sebuah undang-undang adalah undang-undang tersebut mengakomodir prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem pers yang meliputi fungsi tujuan pers secara keseluruhan, serta memasukkan juga ketentuan-ketentuan yang lebih detail mengenai standart berita yang baik dan layak untuk dimuat. Namun dalam undang-undang Pers saat ini hanya mengakomodir 4 fungsi yang ada di sistem pers dan ketentuan terkait 4 fungsi tersebut hanya sebatas

pernyataan bukan perintah yang bersifat mengatur atau memaksa sehingga tidak berakibat hukum atau tidak ada sanksi yang dapat dikenakan. Sifat mengatur dan memaksa dalam undang-undang ini justru terletak pada pasal lain yang mengatur tentang apabila barangsiapa melakukan penyensoran dan pembredelan terhadap pers, atas ketentuan tersebut terdapat sanksi yang dapat dikenakan. Hal ini menunjukkan kebebasan pers dalam sistem yang absolut yang tidak mampu menerima kritik dan sensor apapun.

Unsur-unsur dalam berita olahraga dengan berita pada umumnya berbeda. Menurut MacDougal, dalam menetapkan hal menarik atau *feature* sebuah pertandingan, dapat mempertimbangkan unsur-unsur potensial berikut :⁶

1) Arti suatu pertandingan

Bagian ini biasanya dimuat sebagai berita pengantar utama, dalam bagian ini biasanya memunculkan konflik pertandingan.

2) Perkiraan hasil pertandingan

Bagian ini cukup berisi perbandingan bobot dan pengalaman para kontestan, permainan baru, taktik baru. Kekuatan para pemain, pertandingan terdahulu, rekor-rekor baru baru ini. Menurut MacDougal muatan-muatan di atas sudah cukup memberikan nilai potensial sebuah berita pertandingan olahraga. Apabila dikaitkan dengan publikasi prediksi kemenangan dari situs judi bola dunia yang dimuat oleh salah satu surat kabar di Indonesia jelas berlebihan. Karena setelah dianalisis lebih jauh surat kabar lain tidak mencantumkan prediksi dari situs judi bola dunia seperti

⁶ Ibid, Hlm. 218

yang dilakukan surat kabar tersebut. Oleh karena itu peneliti berkesimpulan bahwa redaksi surat kabar tersebut keluar dari prinsip-prinsip pers.

3) Bagaimana kemenangan diraih

Bagian ini memuat pertandingan sebelumnya dan rincian kemenangan yang pernah di dapat oleh tim

4) Permainan-permainan yang penting

5) Rekor individual, bintang,dsb

6) Cedera

7) Event atau penontonnya

8) Cuaca

9) Boks hasil pertandingan (skor), klasemen, dan statistik

1. Analisis secara Yuridis Normatif tindakan publikasi prediksi kemenangan dari situs judi berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Hasil redaksional Pers dalam hal ini media cetak harus sejalan dengan fungsi nya. Pernyataan harus yang peneliti gunakan merupakan pendapat subjektif peneliti, karena pada prinsipnya produk pers harus mencerminkan fungsi pers.

Fungsi Pers berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 :⁷

- (1) Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial ;
- (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

⁷ Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887)

Dengan menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa terlebih dahulu perlu dilihat bahwa ketentuan ayat (1) merupakan frasa yang bersifat kumulatif bukanlah alternatif karena itu antara fungsi satu dengan yang lain saling berhubungan dan tidak dapat dimaknai terpisah. Sehingga apabila dalam pemberitaan media cetak koran tersebut tidak memenuhi satu saja fungsi, itu artinya sama dengan tidak efektif berjalan sesuai fungsi utama. Masing-masing dari fungsi tersebut dapat diuraikan dan dikaitkan sebagai berikut : pemberitaan yang memuat prediksi kemenangan oleh media cetak surat kabar dengan fungsi informasi yang menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia informasi/in-for-ma-si/ berarti 1) penerangan; 2) pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu,⁸ tindakan publikasi oleh surat kabar tersebut telah tepat dan memenuhi fungsi informasi sekaligus fungsi hiburan karena muatannya dapat menarik minat pembaca. Namun publikasi prediksi dari situs judi bola dunia yang dimuat oleh surat kabar tersebut tidak mencerminkan fungsi pers sebagai media edukasi atau pendidikan karena pendidikan atau edukasi berdasarkan pengertiannya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam proses pengajaran atau pembelajaran. Artinya nilai-nilai pendidikan harus diarahkan pada pembentukan pribadi seseorang sebagai makhluk individu, sosial, religious dan berbudaya. Sedangkan publikasi prediksi kemenangan oleh Surat Kabar tersebut bukanlah perwujudan dari nilai-nilai pendidikan luhur yang

⁸ -----, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/informasi> (online), diakses 16 Juni 2016

dapat menghasilkan pribadi religious dan berbudaya tetapi justru berdampak pada penyalahgunaan oleh parapecinta sepak bola untuk memasang taruhan (bet) judi baik secara online maupun secara langsung.

Menurut Aristoteles pada tingkat pendidikan prinsip dasarnya adalah menanamkan kesadaran akan aturan-aturan moral.⁹ Pendidikan berarti sebagai sebuah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok untuk mendewasakan manusia tersebut melalui upaya pengajaran. Seperti dikutip oleh Ahmad Tafsir dalam C. Lodge, dalam bukunya yang berjudul *Philosophy of Education*, menyatakan bahwa dalam pengertian luas pendidikan itu menyangkut pengalaman yang memiliki tujuan yang mulia, baik dihadapan manusia maupun di hadapan Tuhan.¹⁰ Pendidikan harus bersifat otonomi yaitu memberikan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan secara maksimal kepada individu atau kelompok untuk mencapai hidup yang mandiri dan lebih baik. Artinya segala sesuatu yang bersifat mendidik harus bertujuan untuk menciptakan nilai-nilai baik dan hasil berupa kehidupan yang lebih baik secara moral maupun fisik. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Socrates adalah untuk merangsang penalaran yang cermat dan disiplin mental yang akan menghasilkan standar moral yang tinggi.¹¹

Sedangkan kontrol sosial menurut prespektif kontrol itu sendiri adalah terbatas pada delikueni dan kejahatan. Kontrol sosial merupakan

⁹ Aliet Noorhayati Sutrisno, **Telaah Filsafat Pendidikan (EdisiRevisi)**, Deepublish, Sleman Yogyakarta, 2014, hlm.52

¹⁰ Teguh Wangsa Gandhi, **Filsafat Pendidikan**, Ar-ruzz Media, Yogyakarta, 2011,Hlm.

¹¹ Ibid,Hlm. 110-111

suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma - norma sosial agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Menurut Roucek dalam mendefenisikan pengendalian sosial tidak hanya pada tindakan terhadap mereka yang membangkang, tetapi proses - proses yang dapat diklasifikasikan sebagai proses sosialisasi. Sehingga apabila kejahatan yang timbul karena tidak adanya kontrol sosial dapat dipandang sebagai kelemahan ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat atau macetnya integrasi sosial.¹² Pengendalian sosial dalam kajian E.A Ross mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial, kontrol sosial didefinisikan sebagai upaya mempertahankan ketertiban yang ada.¹³ Bila dikaitkan dengan fungsi pers, pers sebagai subyek harus mampu menciptakan kontrol sosial atau menjaga pelaksanaan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif. Sehingga apabila fungsi edukatif tidak terpenuhi secara otomatis kontrol sosial tidak berjalan sepenuhnya karena tidak terpenuhinya elemen edukasi masyarakat dalam pelaksanaannya.

Pemberitaan prediksi kemenangan juga telah melanggar ketentuan pasal 18 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) yaitu :¹⁴

“2.Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13, dipidana dengan denda paling banyak RP 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

¹² Yesmil Anwar Adang, **Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 101

¹³ Tina Asmarawati, **Sosiologi Hukum : Petasan ditinjau dari Prespektif Hukum dan Kebudayaan**, Deepublish, Sleman Yogyakarta, 2014, hlm.131

¹⁴ Pasal18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887)

Pasal 5 ayat (1) butir ke 1 :¹⁵

“ 1. Pers Nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.

Tindak pidana pasal 18 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) dirumuskan dengan perbuatan pasif yang apabila dimaknai terbalik berarti menghukum perbuatan pers yang “tidak” menghormati norma-norma agama dan kesusilaan serta asas praduga tak bersalah.¹⁶ Meskipun frasa tersebut di atas membingungkan dan tidak lazim ada dalam sebuah ketentuan yang bersifat melarang, namun masih dapat diuraikan unsure-unsurnya. Apabila pasal 5 ayat (1) diuraikan unsur-unsur tidak pidana sebagai berikut :

Unsur subjektif : Perusahaan Pers

Unsur objektif :

1. Perbuatan

2. Objek : Peristiwa dan opini yang “tidak”
menghormati rasa kesusilaan
masyarakat

Perbuatan memberitakan dalam hal ini dapat disertai unsure keadaan berupa kesengajaan yang dapat menimbulkan sebuah dampak. Apabila dimaknai secara mendalam, prediksi kemenangan yang berasal dari situs judi bola dunia merupakan hasil kalkulasi dan perhitungan seorang ahli yang diperoleh dari statistika pertandingan yang kemudian menyimpulkan sebuah prediksi

¹⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3887)

¹⁶ Adami Chazawi, Prija Djatnika, Ardi Ferdian, Tindak Pidana **Pers (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan)**, CV Mandar Maju, Bandung, 2015, Hlm.183

kemenangan. Dengan kata lain prediksi kemenangan merupakan “opini” dari seorang ahli tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan rasa kesusilaan disini cakupannya sangat luas, namun secara terbatas dalam materi kajian yaitu perjudian, perjudian merupakan wujud pengabaian terhadap kesusilaan di masyarakat dan kepentingan umum.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, muatan penerbitan media cetak, surat kabar, tabloid dan majalah tidak lagi disensor dan tidak boleh dilarang terbit atau dibredel. Berlakunya Undang-Undang Pers ini sekaligus menghapus ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang isinya dapat mengganggu Ketertiban Umum yang menyatakan bahwa :

“Sepanjang menyangkut ketentuan mengenai bulletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan penerbitan berkala dinyatakan tidak berlaku”.¹⁷

Akibat hukum dari penghapusan ketentuan tersebut adalah tidak adanya upaya yang dapat dilakukan Jaksa untuk merampas atau mengamankan hasil fisik media cetak yang melanggar ketertiban umum. Hingga saat inipun, materi informasi dalam surat kabar atau media cetak lainnya tidak bisa dijangkau oleh Penegak Hukum apabila muatannya dianggap melanggar ketertiban umum. Sedangkan yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah salah satunya mengabaikan norma kesusilaan masyarakat, sama halnya seperti penerbitan buku yang isinya dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.

¹⁷ Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang isinya dapat mengganggu Ketertiban Umum.

Menurut Atmakusumah Astraatmadja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, batasan muatan melalui larangan penerbitan bagi buku yang melanggar ketertiban umum seharusnya dikenakan juga bagi media cetak, apabila buku dianggap berbahaya dan dapat mengganggu ketertiban umum, demikian juga halnya dengan media pers cetak karena media cetak dikelola dengan waktu dan deadline yang singkat sehingga pembuatannya dilakukan secara instan, dan kurang akurat.¹⁸ Karena penghapusan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tersebut, mengakibatkan tidak adanya eksekusi redaksional dalam bentuk perampasan hasil cetakan, sehingga pidana yang dapat dikenakan hanya pada personal yaitu melalui dengan denda.

Tindakan publikasi tersebut telah melanggar ketentuan dalam pasal 28F UUDNRI 1945,¹⁹ sejauh ini pasal 28F dikenal merupakan dasar dari tindakan pers, karena dimaknai secara terbatas dan subjektif hanya untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, namun jika dimaknai secara luas ketentuan ini berarti juga untuk menghormati dan menjamin hak para pembaca untuk mendapatkan informasi yang edukatif. Oleh karena itu, kebebasan pers seperti inilah yang dapat dikatakan menyimpang dari prinsip dasar pers yang bertanggung jawab.

Apabila dikaji melalui penafsiran sistematis dengan regulasi serupa yaitu terkait media yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang merupakan payung hukum bagi Media Elektronik yang masih dalam lingkup pers secara umum, sebagai regulasi, undang-undang tersebut telah secara rinci memuat ketentuan larangan untuk

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VII/2010

mendistribusikan informasi yang bermuatan perjudian, yaitu dalam pasal 27 ayat

(2) :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.²⁰

Unsur subjektif : a. Dengan sengaja

b. Tanpa hak

Unsur objektif : a. Perbuatan

1. Mendistribusikan dan/atau

2. Mentransmisikan dan/atau

3. Membuat dapat diakses

b. Objek

1. Informasi elektronik

2. Dokumen elektronik

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE memuat ketentuan sanksi pidana layaknya Undang-Undang Pers, sistem antara keduanya sama yaitu sistem pers demokratis. Letak perbedaannya adalah dalam Undang-Undang ITE mengatur pemberitaan melalui media elektronik (dapat berupa penyiaran) telah secara jelas mengkhususkan tindakan-tindakan yang termasuk dalam tindak pidana perjudian, sedangkan Undang-Undang Pers tidak merumuskan tindakan apa saja yang termasuk dalam tindak pidana perjudian, Undang-Undang Pers bahkan tidak secara spesifik menyebut perjuan atau hal hal terkait perjudian, sehingga peristiwa

²⁰ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

yang dimaksud di dalam ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dapat dimaknai sangat luas.

Dengan adanya publikasi prediksi kemenangan yang lolos editing dan hingga pada penerbitan tersebut menunjukkan adanya tidak adanya penyensoran atau filter oleh perusahaan pers guna membedakan mana berita yang layak terbit dan tidak melanggar ketentuan hukum dan norma, dan mana yang tidak layak terbit. Ketidakjelasan frasa “peristiwa atau opini” dalam pasal 5 ayat (1) menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam, hal ini tentunya dapat dijadikan alibi pers untuk membebaskan diri dari ketentuan dalam Undang Undang Pers terkait publikasi prediksi kemenangan tersebut, sehingga perlu adanya penambahan terkait penjelasan hal-hal apa saja yang termasuk dalam “peristiwa dan opini” yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

Fungsi utama hukum pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.²¹ Dikuatkan dengan konsepsi yang memandang kejahatan (*crime*) sebagai perbuatan yang membahayakan masyarakat sehingga perlu dilarang.²² Mengingat prinsip tersebut, walaupun suatu ketentuan dalam undang-undang pers tidak mengandung unsur paksaan maupun aturan tetap perlu dipatuhi demi meminimalisir pelanggaran dan kejahatan.

2. Analisis secara Etis tindakan publikasi prediksi kemenangan dari situs judi berdasarkan Kode Etik Jurnalistik

²¹ Ali Zaidan, **Menuju Pembaharuan Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 68

²² Moeljanto, **Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 19

Kode Etik jurnalistik dibuat secara tertulis dalam bentuk terkodifikasi, kode etik ini pada dasarnya memuat kaidah-kaidah non hukum. Secara umum prinsip Etika Profesi Jurnalistik harus berpihak pada kepentingan umum, meskipun ketentuan-ketentuan dalam kode etik jurnalistik tidak mengandung sanksi seperti undang-undang, namun harus dipatuhi oleh para wartawan. Sebagai konsekuensi tidak dipatuhinya aturan non hukum tersebut berakibat pada memburuknya martabat profesi wartawan.

Dalam pers ada banyak Organisasi Jurnalis/wartawan, dan kesemuanya membuat kode etiknya masing-masing, misalnya Kode Etik Jurnalistik Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang merupakan kode etik yang dipakai saat ini dan telah disepakati oleh 26 Organisasi wartawan. Wartawan dan jurnalis wajib mematuhi Kode Etik selain melaksanakan ketentuan undang-undang, hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 7 butir 2 Kode Etik PWI .²³

Fungsi kode etik jurnalistik sebenarnya dapat mengamankan pelaksanaan kebebasan dan tanggungjawab sosial pers dari incaran ranjau-ranjau hukum pers. Etika komunikasi pers merupakan penjaga gawang (*gatekeeper*), yaitu sebagai cara melakukan seleksi terhadap kejadian-kejadian yang layak berita atau memiliki nilai berita.²⁴ Dengan demikian secara garis besar media massa harus turut serta membangun masyarakat dengan menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi pembangunan sosial.

²³ “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”

Pasal 7 butir 2 Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

²⁴ A.Muis, Op Cit, Hlm.86

Ciri-ciri kode etik secara umum, yaitu: ²⁵

1. Kode etik memiliki sanksi yang bersifat moral terhadap anggota profesi tertentu.
2. Jangkauan suatu kode etik hanya terbatas pada profesi yang memiliki kode etik tersebut.
3. Kode etik dibuat oleh kelompok profesi sesuai dengan aturan organisasi dan tidak ada campur tangan dari pihak luar.

Ketentuan dalam Kode Etik Jurnalistik secara garis besar mengatur hal yang sama dengan yang diatur dalam undang-undang Pers. Seperti halnya Undang-undang Pers, Kode Etik Jurnalistik juga mengalami beberapa kali perubahan atau amandemen. Jika dikaitkan dengan asas hukum positivisme yaitu mengacu pada kode etik jurnalistik yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/II/2006 dan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers, artinya mengedepankan peraturan yang berlaku saat ini tindakan wartawan atau orang dalam perusahaan pers dalam mempublikasikan prediksi kemenangan dari situs judi tidak dilarang karena tidak ada ketentuan yang mengatur larangan wartawan untuk mempublikasikan prediksi kemenangan. Ketentuan yang berisi anjuran terdapat dalam pasal 1 yaitu :²⁶

“Wartawan Indonesia bersikap Independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.”

²⁵ Hetty Rusyanti, Kode Etik Jurnalistik (online), <http://www.kajian-teori.com/2015/02/kode-etik-jurnalistik.html>, 9 Februari 2015, diakses 13 Juni 2016

²⁶ Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Dengan penafsiran sebagai berikut :²⁷

1. Independen artinya mampu memberitakan laporan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
2. Akurat artinya dapat dipercaya, menyajikan berita dengan benar sesuai keadaan objektif pada saat peristiwa yang bersangkutan terjadi.
3. Berimbang artinya semua pihak mendapat kesempatan yang sama atau seimbang.
4. Tidak bertikad buruk artinya tidak ada niat yang secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Penafsiran tidak bertikad buruk yang dilakukan oleh Dewan Pers terbatas pada hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Apabila dijabarkan lebih luas, cakupan kerugian pihak lain adalah pihak-pihak di luar pihak dalam pers, artinya dapat juga pihak pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Tindakan publikasi tersebut secara Etis telah menyimpangi ketentuan pasal 1 Kode Etik PWI , karena berdampak pada hancurnya nilai-nilai luhur masyarakat dan dapat diartikan merugikan masyarakat karena dapat menimbulkan kejahatan yang akan diuraikan pada analisis rumusan kedua. Namun Kode Etik Profesi sifatnya hanya mengikat hati nurani dalam profesionalitas sehingga sanksi yang

²⁷ Hetty Rusyanti, Op Cit

dapat dikenakan hanya terbatas pada sanksi sosial dan hilangnya profesionalitas wartawan.

B. Publikasi prediksi kemenangan dari situs judi bola oleh media cetak menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang memuat aturan-aturan yang berisi :²⁸

- 1) Menentukan klasifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan , dengan disertai sanksi yaitu berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan itu,
- 2) Menentukan kapan saja serta dalam hal apa saja petindak dapat dikenai hukuman atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diatur,
- 3) Menentukan cara yang digunakan untuk penjatuhan pidana (eksekusi) tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang diduga melanggar aturan tersebut.

Yang menjadi dasar dalam hukum pidana adalah :

- 1) Ketentuan hukum pidana harus tertulis
Akibat hukum dari adanya syarat ini adalah bahwa penafsiran terhadap rumusan undang-undang dapat saja terjadi jika ketentuan tersebut kabur atau kurang jelas.
- 2) Ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut (retro aktif).

Perbuatan pidana hanya merujuk pada sifat perbuatannya saja yaitusifat dilarangnya suatu perbuatan, sedangkan yang menentukan benartidaknya atas

²⁸ Moeljanto, Op Cit, hlm.1

larangan tersebut dapat dijatuhi pidana tergantung pada hubungan batin petindak dengan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut menimbulkan dampak. Hubungan petindak dengan perbuatan publikasi adalah saling berhubungan, karena diawali oleh perhitungan dari seseorang yang paham betul tentang sepak bola dan kiperahnya, sehingga orang tersebut melalui pengamatan dan keterampilannya, menghitung dari rekor-rekor kemenangan lalu menyimpulkan hasil yaitu prediksi kemenangan. Hasil berupa prediksi yang dipublikasikan tersebut merupakan hasil dari pemikiran petindak yang memang dikehendaki dan dilakukan sepenuh hati. Oleh karena itu ada hubungan antara petindak dan perbuatan yang dilakukan, dan petindak secara tidak langsung telah mengetahui dampak yang akan timbul dari adanya perbuatan petindak karena petindak merupakan orang yang tahu betul mengenai dunia sepak bola tentu tahu bahwa konsumen atau pembaca surat kabar khususnya laman/kolom prediksi kemenangan itu tidak lain adalah para penggemar sepak bola. (Pernyataan demikian akan diulang kembali dan dibahas lebih lanjut pada bab rumusan tentang kesengajaan dan kesalahan).

Berikut merupakan hasil penelitian untuk menunjukan minat dan tujuan responden (yang telah diklasifikasikan sebelumnya), ketika melihat Surat Kabar Jawa Pos yang memuat berita menarik yaitu rekor-rekor kemenangan terdahulu/*head to head*, prediksi kemenangan dan klasemen/statistic. Berikut merupakan table perbandingan tujuan parapembaca bagian redaksional olahraga sepak bola.

Tabel 2.1
Perbandingan motivasi/tujuan pembaca redaksional olahraga sepakbola
kolom prediksi kemenangan

No	Muatan menarik	Motivasi/tujuan (Variabel)	Presentase (%)
1	Rekor-rekor kemenangan terdahulu/head to head	Acuan taruhan	9,1%
2	Prediksi kemenangan	Acuan taruhan	63,6%
3	Rekor-rekor kemenangan terdahulu/head to head	Hiburan/pengetahuan	18,2%
4	Prediksi kemenangan	Hiburan/pengetahuan	0%
5	Klasemen statistik	Hiburan/pengetahuan	9,1%

Sumber : data tersier, diolah Mei 2016

Rekor-rekor kemenangan terdahulu/*head to head* , prediksi kemenangan dan klasemen/statistik merupakan hal paling menarik pembaca khususnya pecinta sepakbola. Dari ketiga isi tersebut 63,6% pembaca menggunkannya sebagai acuan taruhan, taruhannya pun bermacam-macam yaitu taruhan online, langsung bersama teman-teman maupun di tempat tertentu. 3 hal tersebut berasal dari situs judi (bursa judi dunia) sehingga beberapa orang yang bertaruh secara online sudah pasti mengetahui situs-situs seperti *williamhill landrock, bwin, CORAL, Sportingbet, Bet365*,²⁹ 9,1% pembaca menggunakan juga rekor-rekor kemenangan

²⁹ Bwin merupakan situs judi online terbesar dan terpercaya

Rumah Paypal, <http://www.rumahpaypal.com/2012/08/bwin-situs-judi-online.html> (online), Diakses 16 Juni 2016

Situs Internasional

- 1 Bwin (2009)
2. PartyGaming (2008)
3. Betfair (2008)
4. Bet365 (2009)
5. William Hill (2009)
6. Ladbrokes (2009)
7. Mangas Gaming (2009)
8. Paddy Power (2008)
9. Unibet (2009)
10. Sportingbet (2009)

Karlina Octaviany, Amal Nur Ngazis, Daftar 10 Situs Judi Online Terbesar (online),

terdahulu sebagai acuan, biasanya mereka menghitung sendiri kemungkinan keunggulan dan kemenangan dari tim yang bertanding.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ada dua pandangan dalam mengkaji terkait tindak pidana yang dapat menentukan adanya penjatuhan pidana, yaitu pandangan Monoistis dan Dualistis.

- 1) Pandangan Monoistis berorientasi pada semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Pandangan ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatan dengan pertanggungjawaban pidananya.³⁰ Salah satu ahli dalam pandangan Monoistis adalah Simon, yang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah : 1) perbuatan manusia (positif atau negatif), 2) diancam dengan pidana, 3) melawan hukum, 4) dilakukan dengan kesalahan, 5) oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³¹ Dari kelima unsur Simon tersebut yang dikenal dengan unsur subjektif dan objektif. Inti dari pandangan ini adalah bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan.³² Menurut pandangan ini perbuatan pidana hanya ditujukan kepada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan sebagai sebuah kesengajaan, artinya tidak memperhitungkan perbedaan niat pelaku, bagi pandangan ini semua niat pelaku adalah sama karena penekanan ada pada akibat. Sehingga

<http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/334384-inilah-10-situs-judi-online-terbesar-di-ri> , 11 Juli 2012, diakses 16 Juni 2016

³⁰ Masruchin Rubai, Op cit, Hlm.22

³¹ Ibid

³² Roeslan Saleh, Op Cit, Hlm. 13

publikasi prediksi kemengan lebih dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monoistis ini karena atas perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat berupa tindak pidana perjudian , akibat ini berasal dari perbuatan orang yang menurut pandangan ini dianggap sebagai suatu kesengajaan karena berorientasi pada akibat yang ditimbulkan.

2) Pandangan Dualistis

Dalam pandangan ini memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pemisahan ini menjadi dasar pandangan ini, dan yang menjadi unsur tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act*.³³

Dalam menentukan publikasi prediksi kemenangan tersebut merupakan tindak pidana atau tidak, perlu dianalisa terkait unsur subjektif dan objektif suatu tindak pidana. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri seseorang / pelaku termasuk niat dan pemikiran yang ada dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur eksternal diluar diri pelaku yang erat kaitannya dengan keadaan ketika suatu tindakan pelaku dilakukan. Unsur subjektif tindak pidana adalah :³⁴

- 1) *Dolus* atau *culpa*
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu

³³ Masruchin Rubai, Op cit, Hlm. 23

³⁴ Lamintang, Fransiscus Theojunior Lamintang, Op Cit., Hlm .192

5) Perasaan takut atau *vress*

Sedangkan unsur objektif suatu tindak pidana adalah :³⁵

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku, meliputi kausalitas perbuatan

Macam- macam klasifikasi dalam unsur subjektif dan objektif tidak diterapkan secara kumulatif, sehingga satu syarat terpenuhi sudah dapat diartikan memenuhi suatu unsur. Dalam hal ini publikasi prediksi kemenangan tersebut telah memenuhi rumusan kesengajaan dan adanya maksud dari perbuatan tersebut. Keterkaitan antar unsur tidak terlepas dari beberapa hal diatas tetapi juga pada klasifikasi delik, delik formil atau delik materiil. Delik formil menekankan pada perbuatan yang dilarang, sedangkan delik materiil menekankan pada akibat yang dilarang karena menimbulkan suatu akibat konstitutif. Tetapi pada konsepsi utama terlebih dahulu rumusan tindak pidana harus ditentukan unsur subjektif yaitu isi hati pelaku, berupa kesengajaan atau ketidaksengajaan.

1.1 Rumusan Kesengajaan

Seorang pelaku dapat dikatakan telah melakukan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan secara sengaja adalah ketika pelaku benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan atau mengetahui maksud dari perbuatannya. Kesengajaan yang dimaksud setidaknya tidaknya berasal dari kehendak yang ditujukan pada perbuatan yang dilarang atau akibat yang dilarang. Seperti

³⁵ Ibid

yang dilakukan oleh media cetak (perorangan maupun korporasi) yang menyertakan prediksi kemenangan dari situs judi bola dalam redaksi olahraga sepakbola , sedangkan dalam teori jurnalistik perkiraan hasil pertandingan tidak lebih dari perbandingan bobot, rekor individual, kemampuan dalam menghadapi lawan, permainan baru dan taktik baru, *head to head*, rekor rekor terbaru.³⁶ Sedangkan prediksi kemenangan yang dipublikasikan berada diluar teori jurnalistik tersebut yang apabila dikaitkan dengan kesengajaan, subjek sesungguhnya memiliki maksud tertentu dan mengetahui akibat yang mungkin ditimbulkan. Maksud tujuan tersebut tidak lepas dari mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya atau menarik konsumen. Karena hanya satu media cetak yang memuat prediksi kemenangan tersebut, media cetak lain hanya memuat jadwal pertandingan dan rekor-rekor terbaru tim. Mengingat media cetak merupakan perusahaan bisnis yang tentu mengutamakan keuntungan daripada menyeleksi muatan redaksionalnya.

Menurut Profesor Van Hamel, pada delik materiil atau *voltooid delict*, *opzet* atau kesengajaan hanyalah berkenaan dengan sesuatu yang sebenarnya telah dilakukan atau yang telah ditimbulkan.³⁷ Pada delik delik yang telah disyaratkan bahwa delik delik tersebut dilakukan harus dengan sengaja, *opzet* hanya dapat ditujukan pada :

³⁶ Hikmat Kusumaningrat, Purnama Kusumaningrat, Op Cit, hlm. 217-218

³⁷ Ibid., Hlm . 294

- a. Tindakan tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu, artinya tindakan media cetak Jawa Pos merupakan tindakan melakukan sesuatu, yang membuat orang tergerak untuk melakukan tindak pidana pasal 303 bis.
- b. Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang undang-undang

Tindakan media cetak tersebut dapat dikategorikan dalam point ini karena telah menimbulkan suatu akibat yang dilarang yaitu tindak pidana perjudian pasal 303 bis KUHP.

- c. Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan.

Mengenai pengertian kesengajaan dalam hukum pidana dikenal 2 macam teori, yaitu :

1. Teori kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut Von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu.³⁸ Bila dikaitkan dengan publikasi prediksi kemenangan dari situs judi bola oleh media cetak koran dapat dianalisis melalui teori kehendak karena melalui kajian filsafat munculnya kehendak dipengaruhi dan didorong oleh beberapa

³⁸ Leden Marpaung, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.14

hal yang berasal dari luar petindak yaitu masalah sosiologis berupa kemiskinan, kelaparan, keadaan lingkungan, dll.

2. Teori membahayakan (*Voorstellingstheorie*)

Teori ini meyakini bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membahayakan kemungkinan adanya suatu akibat.³⁹

Dalam *code penal* mengenai *dolus* adalah apabila dari suatu perbuatan yang terlarang, yang telah dilakukan dengan sengaja itu telah timbul suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku.⁴⁰

Kesengajaan dibagi menjadi 3 yaitu :⁴¹

1) Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*)

Menurut Prof. Van Hatum, *opzet als oogmerk* ditujukan kepada tindakan tindakan, baik merupakan tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ataupun tindakan untuk menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang. Orang dalam media cetak tersebut memiliki maksud untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang, dengan tujuan ekonomi dan keuntungan perusahaan. Kesengajaan sebagai maksud ini hanya berlaku bagi tindakan publikasi prediksi kemenangan oleh media cetak apabila pembaca redaksional tersebut hanya orang

³⁹ Ibid

⁴⁰ Hikmat Kusumaningrat, Purnama Kusumaningrat, Op Cit .,Hlm . 313

⁴¹ Ibid., Hlm . 312

dewasa yang telah cukup umur untuk melakukan tindak pidana judi.

2) Kesengajaan sadar kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Suatu kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kepastian timbulnya akibat lain dari akibat yang dikehendaki pelaku. Misalnya si pelaku melakukan pencurian, ia telah menyadari kepastian akan pecahnya dinding kaca itu jika ia pukul, yakni untuk dapat mengambil benda di dalam etalase. Dalam hal ini media cetak (orang atau korporasi) sadar akan dampak yang timbul, karena menyadari dampak yang timbul yaitu perjudian mendorong orang (pecinta olahraga sepakbola) menjadi membeli koran tersebut dipandang sebagai keuntungan bagi pihak media cetak. Tindakan tersebut dipandang sebagai kesengajaan sadar kepastian karena muatan tersebut juga dapat dibaca oleh orang belum dewasa karena media massa yang digunakan adalah koran atau surat kabar yang pembacanya tidak terbatas umur sehingga petindak sudah seharusnya patut mengetahui bahwa pembaca tersebut tidak hanya orang dewasa.

3) Kesengajaan sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*)

Kesengajaan yang timbul ketika pelaku telah menyadari adanya akibat yang timbul selain akibat yang dikehendaki tetapi pelaku tersebut tetap melakukan perbuatannya atau tidak ada kesadaran untuk membatalkan niatnya dan kemudian ternyata akibat tersebut benar-benar terjadi.⁴² Tindakan publikasi prediksi kemenangan tidak dapat dikategorikan dalam kesengajaan ini karena maksud, tujuan dan akibat telah diketahui bukan merupakan kemungkinan yang terjadi.

Secara ilmu pengetahuan (doktrin), kesengajaan terkait publikasi prediksi kemenangan sebagai unsur delik selalu berkaitan dengan *Dolus generalis* yang artinya kesengajaan yang tidak ditujukan untuk sasaran tertentu, dikarenakan sasaran yang dituju media cetak koran tersebut adalah khalayak ramai atau massa sehingga tidak terikat pada jumlah tertentu dan tidak terbatas. Dalam peristiwa demikian, menurut Mr.H.B.Vos, *opzet* si pelaku adalah umum dan akibatnya adalah sedikit banyak, tidak tertentu.⁴³

Sebagai dasar untuk menguraikan unsur-unsur di dalamnya digunakan interpretasi gramatikal, penafsiran pada dasarnya adalah untuk mencari kehendak pembuat undang-undang yang pernyataannya kurang jelas, kehendak pembuat hanya terbatas pada membuat suatu momentopname belaka terhadap suatu segi pergaulan sosial, maka perlu

⁴² Ibid., Hlm .318

⁴³ Leden Marpaung, Op Cit, hlm.19

penafsiran dikemudian hari ketika suatu undang-undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁴⁴ Berikut merupakan analisis yuridis terhadap ketentuan dalam KUHP secara gramatical.

2. Tindakan publikasi prediksi kemenangan menurut KUHP

Tindakan publikasi prediksi kemenangan dari situs judi bola yang dilakukan oleh media cetak dapat diklasifikasikan dalam tindak pidana menurut ketentuan pasal 303 ayat (1) angka ke 2 .

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mempunyai hak untuk itu :

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat tertentu atau tidak.⁴⁵

Bila diuraikan unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif : dengan sengaja
- b. Unsur objektif : 1. Barangsiapa
 - 2. Tanpa mempunyai hak/tanpa izin
 - 3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

Untuk membuktikan unsur sengaja dalam rumusan harus dibuktikan tentang adanya kehendak petindak (media cetak surat kabar) untuk menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak bermain judi. Artinya sengaja melakukan

⁴⁴ Zainal Abidin Farid, Op Cit, hlm.115

⁴⁵ Pasal 303 ayat (1) angka ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui, MvT menyatakan kehendak merupakan apa yang dikehendaki dengan melakukan suatu perbuatan sedangkan mengetahui mengandung arti memahami, menyadari, menginsyafi atau mengerti segala hal tentang perbuatan yang hendak dilakukan.⁴⁶ Rumusan kehendak yang dimaksud adalah apabila seseorang melakukan dengan sengaja suatu perbuatan harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut.⁴⁷ Artinya, si petindak menghendaki untuk mewujudkan kedua perbuatan itu di depan khalayak umum adalah untuk bermain judi. Kehendak dari petindak termasuk dalam kesengajaan dalam teori kehendak Indeterminisme dimana kehendak petindak merupakan dorongan atau dipengaruhi oleh masalah sosial seperti kemiskinan, dan melalui pandangan ini petindak adalah manusia yang dapat menentukan kehendaknya secara bebas walaupun dipengaruhi hal-hal tersebut.⁴⁸ Namun, kesengajaan petindak tidak perlu ditujukan pada unsur tanpa izin, karena unsur tanpa izin dalam rumusan terletak sebelum unsur kesengajaan. Artinya si petindak tidak perlu menyadari bahwa di dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan itu ia tidak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. Seperti yang telah dikemukakan oleh Peters, bahwa kesengajaan itu dapat dipandang sebagai pernyataan tentang keterarahan secara intensionil dari kelakuan terhadap akibat.⁴⁹ Kehendak Media Cetak Jawa

⁴⁶ Adami Chazawi, Prija DjatmikaArdi Ferdian, **Tindak Pidana Pers (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang dilindungi dengan Mmempublikasikan Tulisan)**, CV Mandar Maju, Bandung, 2015,hlm. 189

⁴⁷ Leden Marpaung, Op Cit, hlm. 13

⁴⁸ Ibid, Hlm. 15

⁴⁹ Roeslan Saleh, Op cit, hlm. 24

Pos untuk mendapatkan keuntungan ekonomi melalui minat pembaca dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.2

**Nama media cetak koran yang beredar di kota Malang dan
Perbandingan muatannya**

No	Nama Media Cetak	Muatan
1	Kompas	<ul style="list-style-type: none"> • Jadwal pertandingan • Berita terkait tim tertentu • Rekor terbaru • Rekor individual • Kondisi pertandingan lalu • statistik
2	Jawa Pos	<ul style="list-style-type: none"> • Berita terkait tim tertentu • Rekor terbaru • Grafis strategi posisi pemain • <i>Head to head</i> (5 pertandingan terakhir) • Bursa dan prediksi kemenangan • Jumlah laga • Asian handicap • Rekor individual • Kondisi pertandingan lalu
3	Malang pos	<ul style="list-style-type: none"> • Jadwal pertandingan • Berita terkait tim tertentu • Rekor terbaru • Rekor individual • Kondisi pertandingan lalu
4	Republika	<ul style="list-style-type: none"> • Prediksi Susunan Pemain • Jadwal Pertandingan • Rekor-rekor kemenangan lalu
5	Surya	<ul style="list-style-type: none"> • Jadwal pertandingan • Rekor-rekor pertandingan lalu • Prediksi susunan pemain • Top skor
6	Sindo	<ul style="list-style-type: none"> • Perkiraan susunan pemain

		<ul style="list-style-type: none"> • Jadwal pertandingan • Rekor rekor kemenangan lalu • statistik
--	--	---

Sumber : data tersier, diolah Mei 2016

Menurut MacDougal, dalam menetapkan hal menarik atau *feature* sebuah pertandingan, dapat mempertimbangkan unsur-unsur potensial berikut :⁵⁰

1. Arti suatu pertandingan

Yang termasuk di dalamnya adalah pengaruh hasil pertandingan terhadap catatan rekor para pemain, berita utama pertandingan.

2. Perkiraan hasil pertandingan

Yang dimaksud disini adalah perbandingan bobot, rekor individual, kemampuan dalam menghadapi lawan, permainan baru dan taktik baru, *head to head*, rekor rekor terbaru.

3. Bagaimana kemenangan diraih

Mencakup gaya permainan dari tim yang menang dan yang kalah, kesalahan yang pernah dilakukan, serta semangat tim.

4. Permainan-permainan yang penting

Termasuk di dalamnya mengenai Bagaimana skor dicetak, tendangan-tendangan spektakuler, penalti dan pelanggaran serta keputusan yang kontroversial oleh wasit.

5. Rekor individual, bintang,dsb

Berisi rekor yang terpecahkan, skor skor tinggi, pemain-pemain yang menyelamatkan, kerjasama tim, rekor individual.

6. Cedera

⁵⁰ Ibid, Hlm. 218

7. Event atau penontonnya

Berisi banyaknya penonton pertandingan lalu, event tahunan, antusiasme.

8. Cuaca

9. Boks hasil pertandingan (skor), klasemen, dan statistik

Berdasarkan teori Jurnalistik yang didukung oleh pendapat MacDougal, beberapa rumusan tersebut sudah cukup membuat *feature* atau hal menarik berita pertandingan. Sehingga dapat diartikan bahwa tindakan media cetak Jawa Pos telah melewati standart muatan berdasarkan teori umum Jurnalistik. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tujuan peningkatan pemasaran dengan menyajikan secara berbeda muatan pertandingan sepak bola.

Unsur objektif pertama adalah unsur barangsiapa untuk menunjukan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut , maka ia dapat disebut pelaku.⁵¹ Yang dimaksud adalah subyek perorangan maupun perusahaan Jawa Pos tersebut. Sedangkan unsur berikutnya yaitu unsur tanpa mempunyai hak yang dimaksud adalah bahwa media cetak tidak memiliki izin untuk mempublikasikan prediksi kemenangan dari situs judi bola (bursa). Penerbitan redaksional pers bebas siup sehingga tidak ada batasan perizinan untuk penerbitan. Unsur objektif ketiga menunjukan bahwa pelaku yaitu media cetak tersebut harus terbukti menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai yaitu dilakukan di tempat umum, sedangkan menurut pengertiannya media cetak koran merupakan media massa yang luas cakupan tidak terbatas sasaran umur pembaca, sehingga dapat diartikan sebagai khalayak

⁵¹ Lamintang, Theo Lamintang, **Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan (edisi kedua)** , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 294

ramai dalam hal ini dapat disimpulkan memenuhi pengertian *dolus generalis* dalam teori kesengajaan, namun tindakan menawarkan dan memberi kesempatan ini tidak secara langsung melainkan melalui media yaitu koran. Dan unsur dalam suatu usaha dapat diartikan bahwa koran merupakan hasil redaksional dari perusahaan pers yang mempunyai tujuan ekonomis.

Dalam hal ini tindakan sengaja memerikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi ialah melalui informasi prediksi kemeangan, terlebih dahulu perlu dianalisis di dalam informasi tersebut terkait sifat melawan hukum yang terkandung di dalamnya. Prediksi kemenangan yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan (oleh 63,6% responden) isisnya melanggar kepentingan hukum masyarakat yang dilindungi oleh hukum karena dapat menimbulkan konflik sosial akibat terjadinya tindak pidana perjudian yang merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan.

Tindakan publikasi prediksi kemenangan dari situs judi bola yang telah memenuhi rumusan pasal 303 ayat (1) angka 2 ini semakin didukung oleh pendapat Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, secara historis ketentuan pasal 303 ayat (1) KUHP, yang menjadikan dapat dipidananya suatu perbuatan dalam ketentuan ini terletak pada kenyataan bahwa oleh adanya tindakan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk berjudi, **menyebabkan orang-orang yang tidak dapat berfikir dengan sadar dan wajar dapat terdorong untuk melakukan tindak pidana atau setidaknya melakukan tindak pidana dalam ketentuan pasal 303 bis KUHP.**⁵² Yang menjadi dasar dapat dipidananya perbuatan dalam ketentuan 303 ayat (1)

⁵² Ibid, hlm.283

angka 2 terletak pada kenyataan jika permainan tersebut, dan khususnya oleh sifatnya, hasrat orang menjadi tidak dapat terkendali dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri, dan karena permainan tersebut masyarakat memandang adanya hubungan antara perjudian, penyalahgunaan minuman keras dan pelacuran dengan kata lain dapat disertai atau diikuti tindak pidana lain. Apabila dikaitkan dengan tabel 2.1 yang menunjukkan 63,6% minat dan tujuan responden memilih prediksi kemenangan dan digunakan sebagai acuan taruhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 303 ayat (1) butir 2 telah terpenuhi.

Sedangkan akibat dari tindak pidana pasal 303 ayat (1) butir 2 adalah tindak pidana perjudian pasal 303 bis KUHP. Permainan judi dalam bahasa asingnya disebut *hazardspel*. Tidak semua permainan masuk ke dalam *hazardspel* tetapi tidak hanya terbatas permainan yang luas. Dalam arti sempit permainan *hazard* adalah segala permainan yang kalah menangnya orang tidak bergantung pada kecakapan atau keahlian, melainkan hanya tergantung kepada nasib baik dan sial saja. Yang masuk dalam *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain.⁵³ Secara yuridis pengertian permainan judi yaitu Pasal 303 ayat (3) :

Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan dan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.⁵⁴

⁵³ R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Sukabumi, 1988, hlm. 222

⁵⁴ Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Yang termasuk di dalam permainan perjudian ada 2 yaitu permainan dan pertarungan. Perjudian dalam bentuk permainan yaitu sebagai berikut :⁵⁵

1. Suatu Permainan yang memungkinkan untuk mendapat untung bergantung para peruntungan atau nasib saja. Sehingga menang kalahnya atau untung ruginya hanya bergantung pada keberuntungan atau klebetulan saja.
2. Permainan yang memungkinkan untuk mendapat untung atau menang sedikit atau banyak bergantung pada kemahiran atau keahlian pemain.

Sedangkan perjudian dalam bentuk pertarungan adalah :⁵⁶

1. Segala bentuk pertarungan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan mereka yang turut berlomba atau bermain. Judi bola termasuk dalam judi pertarungan jenis ini.
2. Segala bentuk pertarungan lainnya yang tidak ditentukan artinya segala bentuk pertarungan selain disebut dalam point 1 adalah termasuk perjudian.

Larangan untuk segala tindak pidana yang memuat unsur perjudian didukung oleh pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan pasal perjudian, majelis Hakim menegaskan bahwa :⁵⁷

1. Tujuan larangan bermain judi tidak lain adalah semata-mata untuk kepentingan orang banyak berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai

⁵⁵ Adam Chazawi, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.166

⁵⁶ Ibid, hlm. 167

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VIII/2010

agama, keamanan, dan ketertiban umum yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat Indonesia. Ketertiban umum yang dimaksud

2. Norma larangan perjudian tersebut, menurut Pemerintah memuat norma hukum yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan penguasa umum dalam menjalankan tugasnya dari perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma agama

Ditinjau dari aspek yuridis yaitu dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUDNKRI 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum maka dipandang perlu untuk pemerintah menertibkn segala macam perjudian agar sesuai dengan jiwa dan maksud daripada Undang-Undang *a quo* yang menjadi landasan yuridis konstitusional untuk mencegah dampak negatif yang timbul dari perjudian dan yang dapat mengurangi nilai-nilai moralitas masyarakat terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam agama yang diyakininya.⁵⁸

Berikut adalah macam-macam delik pers dan delik yang berkaitan dengan media cetak yang telah dirumuskan tersendiri dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia :⁵⁹

1. Pembocoran Rahasia Negara (Pasal 112)⁶⁰
2. Pembocoran Rahasia Hankam Negara ⁶¹

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Departemen Penerangan RI, **Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Yang Ada Kaitannya Dengan Media Massa**, Departemen Penerangan RI, Jakarta, 1999, Hlm.1

⁶⁰ Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :
“Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangannya yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

⁶¹ Pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

3. Penghinaan (Pasal 134-137, 142-144, 154-155,156-163,207-208,320-321)

Pada dasarnya penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual. Bentuk penghinaan dalam KUHP di bagi menjadi beberapa bagian :⁶²

- 1) Pencemaran
- 2) Pencemaran tertulis
- 3) Penghinaan ringan
- 4) Fitnah
- 5) Fitnah pengaduan
- 6) Fitnah tuduhan

Dari beberapa macam penghinaan tersebut yang dalam bentuk tertulis dapat dilakukan oleh pers, artinya hanya 3 macam penghinaan yang berkaitan dengan pers yaitu pencemaran tertulis, penghinaan ringan dan fitnah. Sehingga dari 12 pasal dalam penghinaan, yang dapat dikenakan pada pers adalah 8 pasal saja. Utamanya pasal 310, 311 dan 315 KUHP.⁶³

“(1) Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau bendabenda yang bersifat rahasia yang bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunanya benda- benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

⁶² Wina Armada, Op Cit , Hlm. 52,53

⁶³ Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

“(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

4. Pelanggaran kesusilaan (Pasal 282,316-317)⁶⁴
5. Pelanggaran hak ingkar (Pasal 322) ⁶⁵
6. Pendahan penerbitan dan percetakan (Pasal 483-485)⁶⁶

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

“(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan”.

Pasal 315 Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

⁶⁴ Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka oranng yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulis- an, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan”.

⁶⁵ Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

“(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu”.

⁶⁶ Pasal 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

“Barang siapa menerbitkan sesuatu tulisan atau sesuatu gambar yung karena sifatnya dapat diancam dengan pidana, diancam dengan pidana penjnra paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika:

1. si pelaku tidak diketahui namanya dan juga tidak diberitahukan namanya oleh penerbit pada peringatan pertama sesudah penuntutan berjalan terhadapnya;
2. penerbit sudah mengetahui atau pat,ut menduga hahwa pada waktu tulisan atau gambar itu diterbitkan, si pelaku itu tak dapat dituntut atau akan menetap di luar Indonesia”.

Pasal 484 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

7. Pelanggaran ketertiban umum (Pasal 533) ⁶⁷

8. Haatzaai-artkelen

Terdiri dari pasal 154 hingga 157 KUHP yang dibagi menjadi pasal 154 dan 156a merupakan delik pers sedangkan pasal 155 dan 157 merupakan delik penyiaran.⁶⁸

“Barang siapa mencetak tulisan atau gambar yang merupakan perbuatan pidana, diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika:

1. orang yang menyuruh mencetak barang tidak diketahui, dan setelah ditentukan penuntutan, pada teguran pertama tidak diberitahukan olehnya;
2. pencetak mengetahui atau seharusnya renduga bahwa orang yang menyuruh mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar Indonesia”.

Pasal 485 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

“Jika sifat tulisan atau gambar merupakan kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, maka penerbit atau pencetak dalam kedua pasal di atas hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu”.

⁶⁷ Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

“Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

1. barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
2. barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
3. barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;
4. Barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun;
5. Barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun.

⁶⁸ Wina Armada, Op Cit ., Hlm.59

Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”.

Pasal 156 a

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

9. Delik pornografi

Dimuat dalam pasal 281,282,532 dan 533 KUHP

Dalam hal ini pornografi untuk pers berlaku pasal 282 dan pasal 533 KUHP ⁶⁹

Organisasi Pengarang Indonesia (OPI) pada tahun 1956 mengeluarkan pernyataan soal karangan dan gambar yang dinilai porno yaitu sebuah tulisan atau gambar dapat melanggar kesopanan, apabila tulisan atau gambar itu tidak mengandung nilai-nilai baik, melainkan hanya mengandung keinginan atau kehendak untuk dengan sengaja membangkitkan nafsu birahi saja, sehingga menurut norma agama, kesopanan, kesusilaa yang berlaku dalam suatu masyarakat yang dapat menimbulkan pikiran atau membuat orang yang membaca atau mendengar dan melihat dapat melakukan suatu pelanggaran susila.⁷⁰

10. Kabar bohong

11. *Trial by the Press*

Artinya apabila pers memberitakan atau ,mengemukakan seluruh kejadian tanpa sensor termasuk nama lengkap dan potret terdakwa, sama halnya seperti hakim dan atas pemberitaan tersebut dapat mempengaruhi jalannya sidang secara keseluruhan atau sebagian. Pengungkapan potret terdakwa sama halnya pers menghakimi pelaku dan memberi kesan seolah-olah

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

⁶⁹ Wina Armada, Op Cit ,. Hlm.65

⁷⁰ Ibid ,. Hlm.68

pelaku memang bersalah, sedangkan dalam hukum dikenal asas praduga tak bersalah, yang mana pers juga harus mengacu pada asas tersebut.⁷¹

Penggolongan di atas merupakan ketentuan yang dapat dikenakan bagi media cetak atau pers sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Tindak pidana apapun, baru akan dapat diklasifikasikan ke dalam delik pers apabila memenuhi unsur berikut :⁷²

1. Dilakukan dengan perbuatan mempublikasikan, menyiarkan, mempertunjukan,
2. Objek yang dipublikasikan adalah berita/informasi atau ide dan gagasan tertentu,
3. Caranya atau sarananya menggunakan tulisan/cetakan,
4. Di dalam berita/informasi mengandung sifat melawan hukum.

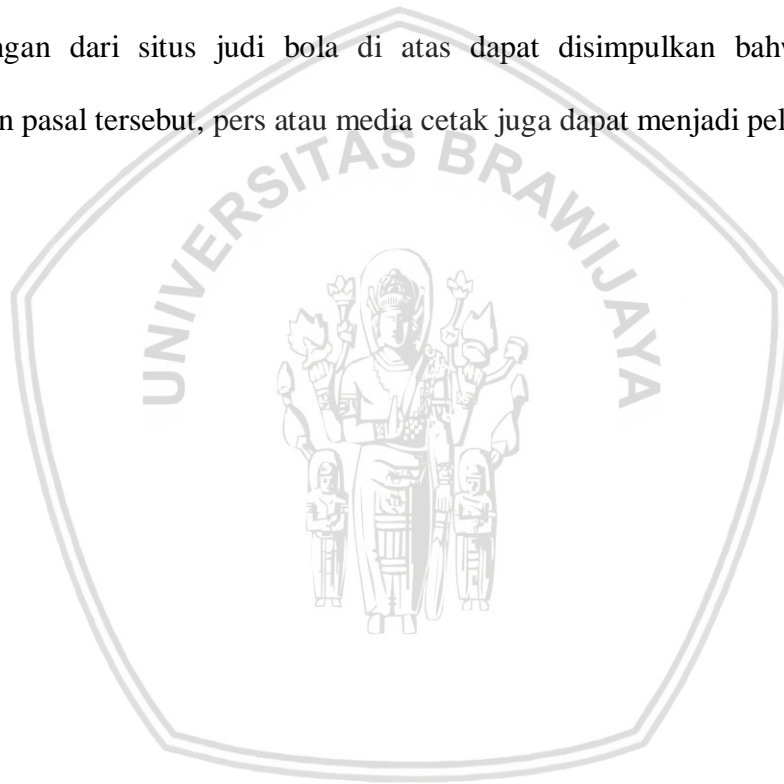
Pada kenyataannya tindakan Media Cetak Jawa Post yang diuraikan dalam pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP telah memenuhi unsur-unsur di atas, yaitu memberikan kesempatan kepada khalayak ramai dapat dimaknai sama dengan mempublikasikan kepada massa suatu prediksi kemenangan melalui cetakan. Karena unsur memberikan kesempatan sama dengan mempublikasikan (sifatnya lebih persuasif, dan tujuan yaitu menarik orang telah berhasil). Karenakedua tindakan tersebut apabila dikaitkan dengan hukum pidana tradisional merupakan kategori tindakan yang jahat karena tindakan itu sendiri (*Mala in se*). Akibat hukum dari pandangan tindakan *mala in se* adalah adanya sanksi yang mengarah

⁷¹ Ibid, ., Hlm.74

⁷² Adami Chazawi, Prija Djatmika, Ardi Ferdian, Op Cit, hlm.203

pada prinsip hukum pidana *malla poene sine lege, nulhum crimen sine lege*, yang mana tidak ada delik tanpa ada norma hukum yang menentukan bahwa itu delik.

Terlihat dalam ketentuan delik-delik pers tersebut tidak menyertakan ketentuan pasal 303 ayat (1) KUHP ke dalam golongan delik pers dikarenakan sejauh ini tidak terdapat fenomena hukum terkait media cetak yang melakukan tindak pidana pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP tersebut. Namun melalui interpretasi gramatikal atas ketentuan KUHP dengan adanya publikasi prediksi kemenangan dari situs judi bola di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap ketentuan pasal tersebut, pers atau media cetak juga dapat menjadi pelaku.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengkajian secara yuridis dan etis terkait publikasi prediksi kemenangan dari situs judi oleh media cetak menghasilkan beberapa kesimpulan :

- 1) Tindakan publikasi prediksi kemenangan dari situs judi bola oleh media cetak koran merupakan bentuk pelanggaran terhadap sistem pers terutama undang-undang pers Nomor 40 Tahun 1999. Tindakan tersebut tidak memenuhi Fungsi Pers berdasarkan Pasal 3 dan melanggar ketentuan pasal 18 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan adanya publikasi prediksi kemenangan yang lolos editing hingga pada penerbitan tersebut, menunjukkan tidak adanya filter oleh perusahaan pers untuk membedakan mana berita yang layak terbit dan tidak melanggar hukum dan ketertiban umum, serta berita mana yang tidak layak. Ketidakjelasan frasa “peristiwa dan opini” yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) menimbulkan penafsiran yang berbeda, hal ini tentu dapat dijadikan alibi bagi pers untuk membebaskan diri dari jerat hukum dalam ketentuan Undang-Undang Pers terkait publikasi prediksi kemenangan.
- 2) Apabila dipandang dari segi Etis, tindakan publikasi prediksi kemenangan tersebut telah melanggar kode etik jurnalistik karena melanggar ketentuan pasal 1 Kode Etik PWI yaitu “Wartawan Indonesia bersikap Independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk”.

Sanksi yang dapat dikenakan hanya sebatas sanksi sosial yaitu hilangnya profesionalitas wartawan.

- 3) Tindakan publikasi prediksi kemenangan dari situs judi bola yang dilakukan oleh media cetak dapat diklasifikasikan dalam tindak pidana menurut ketentuan pasal 303 ayat (1) KUHP angka ke 2 . Karena kehendak dari petindak termasuk dalam kesengajaan dalam teori kehendak Indeterminisme dimana kehendak petindak merupakan dorongan atau dipengaruhi oleh masalah sosial seperti kemiskinan, dan melalui pandangan ini petindak adalah manusia yang dapat menentukan kehendaknya secara bebas walaupun dipengaruhi hal-hal tersebut. ¹ Namun, kesengajaan petindak tidak perlu ditujukan pada unsur tanpa izin, karena unsur tanpa izin dalam rumusan terletak sebelum unsur kesengajaan. Sedangkan unsur tanpa mempunyai hak yang dimaksud adalah bahwa media cetak tidak memiliki izin untuk mempublikasikan prediksi kemenangan dari situs judi bola (bursa). Penerbitan redaksional pers bebas SIUP sehingga tidak ada batasan perizinan untuk penerbitan. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai yaitu dilakukan di tempat umum, dapat diartikan menurut pengertiannya media cetak koran merupakan media massa yang luas cakupan tidak terbatas sasaran umur pembaca, sehingga dapat diartikan sebagai khalayak ramai dalam hal ini dapat disimpulkan memenuhi pengertian *dolus generalis* dalam teori kesengajaan, namun tindakan menawarkan dan

¹ Leden Marpaung, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 15

memberi kesempatan ini tidak secara langsung melainkan melalui media yaitu koran.

B. SARAN

Setelah melihat keadaan di lapangan dan menganalisis dari segi Yuridis dan Etis penulis melihat adanya kekurangan dalam penanganan kasus publikasi prediksi kemenangan dari situs judi bola oleh media cetak koran dikarenakan belum pernah ada aduan dan analisis lebih lanjut terkait tindakan tersebut dalam hukum pidana. Namun jika dikaitkan dengan fakta hukum ketentuan ketentuan dalam undang-undang tersebut terbatas, tidak ada sanksi pidana bagi pelaku tindakan publikasi tersebut. Untuk itu perlu adanya penambahan dalam Undang-Undang Pers terkait penjelasan hal-hal apa saja yang termasuk dalam “peristiwa dan opini” yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1). Karena di era saat ini semakin banyak tindak pidana yang lahir karena adanya kekaburan atau kekosongan hukum.

Dengan adanya prediksi kemenangan yang lolos editing dan hingga pada penerbitan menunjukan kurangnya tindakan penegakan hukum dari aparat penegak hukum, sehingga dirasa perlu bagi aparat penegak hukum lebih jeli menghadapi fenomena hukum baru seperti ini, setidaknya bisa menjadi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana. Penulis juga menganggap perlunya koreksi kembali Undang-Undang Pers dan merekonstruksi kembali ketentuan-ketentuan di dalamnya dengan beberapa hal yaitu: 1) Menambahkan ketentuan tambahan melalui pasal tersendiri atau dalam lembar penjelasan terkait hal-hal apa saja yang dapat dimasukkan dalam pengertian “peristiwa dan opini” yang dimaksud dalam

pasal 5 ayat (1) UU Pers, sehingga terdapat kejelasan dan batasan bagi muatan pers media cetak.. 2) Perlu adanya Surat Ijin Terbit atau Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers bagi setiap orang atau badan hukum untuk menerbitkan surat kabar, majalah dan lain lain agar terdapat batasan muatan pemberitaan.

Kedua hal tersebut di atas hanya membatasi otonomi pers dalam membuat berita, saran tersebut juga didasarkan atas akibat yang ditimbulkan karena itu agar pers tetap pada fungsi dan prinsip yang bertanggungjawab. Pembatasan tersebut tentu akan disangkal oleh pasal bahwa tidak ada penyensoran dan pembredelan dalam pers , namun demi kepentingan hukum dan masyarakat pers diharapkan lebih fleksibel karena apabila dilihat dari sistem pers saat ini telah bergeser ke pers liberal, karena minimnya aturan yang membatasi ruang gerak pers.

Rekonstruksi dengan menambahkan ketentuan baru tersebut merupakan wujud dari proses pembaharuan hukum, yang mana terbentuknya aturan didasarkan pada suatu kasus yang ketentuan yang mengaturnya tidak detail sehingga tidak dapat menjerat pelaku. Apabila dikaitkan dengan konsepsi yang memandang kejahatan (*crime*) sebagai perbuatan yang membahayakan masyarakat sehingga perlu dilarang. Mengingat prinsip tersebut, walaupun suatu ketentuan dalam undang-undang pers tidak mengandung unsur paksaan maupun aturan tetap perlu dipatuhi demi meminimalisir pelanggaran dan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Fuad Usfa, **Pengantar Hukum Pidana (Edisi Revisi)**, UMM Press, Malang, 2006

Djen Amar, **Hukum Komunikasi Jurnalistik**, Alumni, Bandung, 1984

Tribuana Said, **Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila**, CV Haji Masagung, Jakarta, 1988

Hikmat Kusumaningrat, Purnama Kusumaningrat, **Jurnalistik (Teori dan Praktik)**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012

A.Muis, **Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa (menjangkau Era Cybercommunication Milenium Ketiga)**, PT Dharu Anuttama, Jakarta, 1999

Wina Armada, **Wajah Hukum Pidana Pers**, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989

Masruchin Rubai, **Asas-Asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang, 2001

Wikram Iryans Abidin, **Politik Hukum Pers Indonesia**, Grasindo, Jakarta, 2005

Aliet Noorhayati Sutrisno, **Telaah Filsafat Pendidikan (EdisiRevisi)**, Deepublish, Sleman Yogyakarta, 2014

Tina Asmarawati, **Sosiologi Hukum : Petasan ditinjau dari Prespektif Hukum dan Kebudayaan**, Deepublish, Sleman Yogyakarta, 2014

Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Moeljanto, **Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1985

Rasyid Ariman, Fahmi Raghid, **Hukum Pidana**, Setara Press, Malang, 2015

- Nurul Zuriah, **Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori dan aplikasi)**, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009
- Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Departemen Penerangan RI, **Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Yang Ada Kaitannya Dengan Media Massa**, Direktorat Publikasi Direktorat Jenderal PPG Departemen Penerangan RI, Jakarta, 1999
- Nova Oktavia, **Sistematika Penulisan Karya Ilmiah**, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Teguh Wangsa Gandhi, **Filsafat Pendidikan**, Ar-ruzz Media, Yogyakarta, 2011
- Yesmil Anwar Adang, **Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung, 2010
- R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Sukabumi, 1988
- Moeljanto, **Asas-asas Hukum Pidana**, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Lamintang, Theo Lamintang, **Delik delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan (edisi kedua)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Adam Chazawi, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Ali Zaidan, **Menuju Pembaharuan Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Jimly Asshidiqie, Ali safa'at, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, Konsitusi Press, Jakarta, 2012

Adami Chazawi, Prija Djatmika, Ardi Ferdian, **Tindak Pidana Pers (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan)**, CV Mandar Maju, Bandung, 2015

Leden Marpaung, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

SKRIPSI

M. Hasta Angga, **Kajian Yuridis Terhadap Game Online Poker Dalam Facebook Ssebagai Sarana Perjudian (Tinjauan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)**, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010

UNDANG-UNDANG / PERATURAN

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUDNKRI 1945)

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
(Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040)

Undang-Undang Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/IIV2006 dan Peraturan Dewan Pers Nomor 06/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahaan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik (PWI)

Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Penamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum

Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/IIV2006 dan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik (PWI)

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010

INTERNET

Ahmad Kurnia, **Proses Kerja Jurnalistik** (online),

<http://manajemenkomunikasi.blogspot.co.id/2010/06/proses-kerja-jurnalistik.html>, 20 Juni 2010,2016

-----, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/informasi> (online),
2016

Hetty Rusyanti, **Kode Etik Jurnalistik** (online),
<http://www.kajianteorit.com/2015/02/kode-etik-jurnalistik.html>, 9 Februari
2015, 2016

Rumah Paypal, <http://www.rumahpaypal.com/2012/08/bwin-situs-judi-online.html> (online), 2016

Karlina Octaviany, Amal Nur Ngazis, **Daftar 10 Situs Judi Online Terbesar**
(online), <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/334384-inilah-10-situs-judi-online-terbesar-di-ri>, 11 Juli 2012, 2016

